

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**ADE AKHMADI
NIM. 015281778**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Proses Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, September 2012

Yang menyatakan



(Ade Akhmadi)

NIM : 015281778

ABSTRACT**The process of implementation of the School Operational Assistance (BOS)
Education Primary School in Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi**

Ade Akhmadi
Universitas Terbuka
adeakhmadi@yahoo.co.id

Key words : Implementation, Policy, School Operational Assistance (BOS)

This research was conducted to know the policy implementation of School Operational Assistance (BOS) in Kecamatan Belimbing and identify the factors that influence the successful implementation of these policies. This study uses four variables including planning, distribution, use and results of the implementation of BOS.

This research uses a qualitative approach. In this study, which used a sample comprised of five elementary schools BOS beneficiaries in Kecamatan Belimbing with research subjects numbered 30 people consisting of the Head Office, Head of section, Section Chief, the BOS team, Principals, Teachers, Students, Parents and the general public. Data collection procedures conducted through interview, questionnaire, observation and documentation. Data analysis using descriptive analysis with the presentation of data tables.

Analysis of the research results show that at the planning stage is the initial step to prepare the requirements and administrative document. The next stage is the bank's distribution through the school accounts and the acquisition process carried out in stages every 3 months. At funds using stage does the process of monitoring, reporting and inspection. In the final stage of implementation results show that the implementation of BOS influenced to reducing number of dropouts, improving student skills in accordance with the field through extracurricular activities, increasing professionalism of teachers and keeping the school facilities with there's improvement regularly.

Analysis of the factors that affect the BOS implementation found several factors those are authority, resources and supervision.

ABSTRAK**Proses Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi**

Ade Akhmadi
Universitas Terbuka
adeakhmadi@yahoo.co.id

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kecamatan Belimbing dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil pelaksanaan BOS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 5 Sekolah Dasar penerima bantuan BOS di kecamatan Belimbing dengan subjek penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala bagian, Kepala Seksi, tim pelaksana BOS, Kepala sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua Siswa dan masyarakat umum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif dengan sajian data berupa tabel-tabel.

Analisa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan persyaratan dan dokumen administrasi. Selanjutnya tahap penyaluran dilakukan pihak bank melalui rekening sekolah dan proses pengambilannya dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan. Pada tahapan penggunaan dana BOS dilakukan proses monitoring, pelaporan dan pemeriksaan. Pada tahapan terakhir yaitu hasil pelaksanaan terlihat bahwa pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap berkurangnya siswa putus sekolah, meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya profesionalisme guru dan terawatnya fasilitas sekolah dengan adanya perbaikan secara rutin.

Analisa terhadap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS ditemukan beberapa faktor yaitu faktor kewenangan, sumber daya dan pengawasan.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM ; Proses Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten
Melawi

Penyusun TAPM: Ade Akhmadi

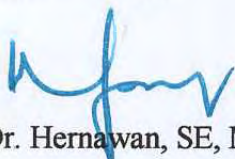
NIM : 015281778

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal ; Sabtu, 28 Juli 2012

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Hernawan, SE, MS.Ak.

NIP : 19580815 198703 1 001

Pembimbing II,



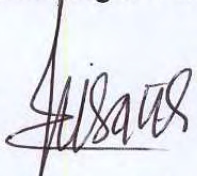
Dr. Aria Jalil

NIP : 130364776

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/

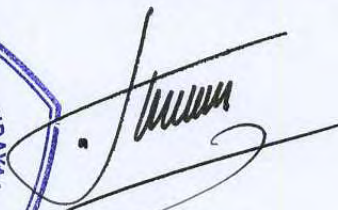
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si

NIP : 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D

NIP : 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : ADE AKHMADI
NIM : 015281778
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL TAPM : PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI
KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juli 2012

Waktu : 08.32-09.40 wib

Dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Nama : Ir. Edward Zubir, MM

Penguji Ahli :

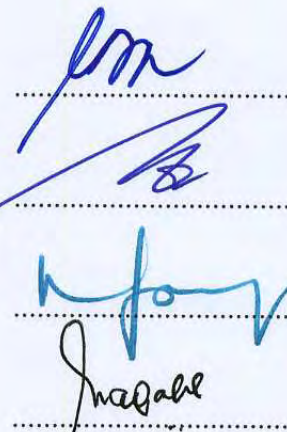
Nama : Dr. Liestyodono B.I, M.Si

Pembimbing I :

Nama : Dr. Hernawan, SE, MS.Ak.

Pembimbing II :

Nama : Dr. Aria Jalil



KATA PENGANTAR

Penulisselalu berusaha memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kekuatan dan membuka jalan serta memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Proses Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi”, sebagai karya akhir dalam mencapai gelar magister pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik maupun sumbang saran yang bersifat membangun sebagai bahan masukan yang berharga bagi kesempurnaan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Hernawan, SE, MS.Ak. selaku pembimbing I dan Dr. Aria Jalil selaku dosen pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis demi menuju proses kesempurnaan sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mendorong selama mengikuti perkuliahan di MAP-UT hingga selesainya penyusunan tesis ini, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan juga kepada :

1. Rektor Universitas Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D.
2. Direktur Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Dra. Susanti,M.Si.
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Ir. Edward Zubir MM

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
6. Seluruh dosen pengajar yang selalu membina dan mentransfer ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi sehingga telah memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan, cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas sekembali dari studi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di MAP-UT yang bersama-sama menempuh studi dalam suka dan duka, turut andil mendukung penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan seluruh beban tugas.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyusun tesis ini.

Penulis hanya dapat berdo'a dan memohon Semoga Allah SWT selalu melindungi serta memberi imbalan yang berlipat ganda atas semua kebaikan yang telah diberikan. Sebagai insan biasa yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi, bagi Dinas Pendidikan kabupaten Melawi dan juga bagi pembaca serta dapat dipergunakan sebagai masukan untuk peneliti lanjutan yang berhubungan dengan tulisan ini.

Pontianak, September 2012

Penulis

Ade Akhmadi

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xiii
Daftar Tabel	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik	9
1. Implementasi Kebijakan	9
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan..	19

3. Ukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan	23
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28
B. Kerangka Berpikir.....	32
C. Definisi Konsep dan Operasional	34
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	36
B. Subjek Penelitian	37
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Analisis Data dan Bentuk Sajian Data.....	39
F. Operasionalisasi Penelitian.....	40
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi....	42
1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi....	42
2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi	43
B. Gambaran Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Melawi.....	46
C. Analisa Implementasi Kebijakan Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing.....	48

1. Tahapan Pertencanaan BOS.....	48
2. Tahapan Penyaluran BOS	58
3. Tahapan Penggunaan Dana BOS	65
4. Hasil Pelaksanaan BOS	82
D. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan BOS di Kecamatan Melawi	94
1. Faktor Kewenangan	94
2. Faktor Sumber Daya	96
3. Faktor Pengawasan	97
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	99
B. Saran-saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	<i>Measuring Performance of Human Service Effectiveness</i>	
	<i>Perspektif</i>	26
Bagan 2.2	Kerangka Berpikir Penelitian.....	33
Bagan 4.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	
	Kabupaten Melawi	45

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi	19
Tabel 3.1	Operasionalisasi Parameter	40
Tabel 4.1	Data 5 Sekolah Penerima BOS Th. 2009	48
Tabel 4.2	Jumlah Dana BOS 5 Sekolah di Kecamatan Blimbing Th. 2001	62
Tabel 4.3	Penggunaan Dana BOS 5 Sekolah di Kecamatan Blimbing Th. 2010	72
Tabel 4.4	Data Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kecamatan Blimbing Th. 2010	83
Tabel 4.5	Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Dasar di Kecamatan Blimbing Th. 2009	87
Tabel 4.6	Kegiatan Perawatan Sekolah Dasar di Kecamatan Blimbing Th 2009	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana pendidikan merupakan suatu wacana populis (merakyat) yang tidak mungkin ada habisnya di negeri ini. Berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pendidikan, banyak muncul terkait dengan nasib pendidikan di negara ini yang selama ini masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti tingginya tingkat buta huruf dan putus sekolah. Berdasarkan data dari BPS tahun 2010 mencapai 7.09% untuk umur 15+ tahun. Permasalahan lain seperti terlalu minimnya fasilitas pendidikan, mahalnya biaya pendidikan dan rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini, merupakan pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah kita. Selama ini berbagai kebijakan dan terobosan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kemajuan pendidikan di negeri ini, namun hal tersebut hingga kini belum mampu memperlihatkan hasil yang sempurna, masih banyak permasalahan-permasalahan pendidikan yang harus dibenahi atau bahkan dirombak total.

Selama kurun tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan penerapan standar kelulusan UN sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia? Karena pada tataran realitas, selama

ini nasib pendidikan di Indonesia kalau tidak dikatakan mundur berarti masih tetap berjalan di tempat.

Ada dua hal mungkin yang bisa menjadi sorotan terkait kurang optimalnya pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, adalah harus adanya penerapan kebijakan yang berbasiskan pada realitas pendidikan. Penerapan kebijakan yang berbasiskan realitas merupakan suatu hal yang wajib menjadi landasan dalam setiap kebijakan pendidikan. Karena realitas mampu menampilkan kondisi pendidikan yang sesungguhnya. (Riyadu, 2008:1)

Basis realitas pendidikan yang dimaksud adalah basis realitas pendidikan yang diambil secara komprehensif (menyeluruh) dan objektif yang terdapat di Indonesia. Faktor komprehensif dan objektif ini menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan yang berbasiskan realitas, karena dari kedua prinsip ini gambaran realitas pendidikan di Indonesia tidak akan menjadi abu-abu dan sempit. Berdasarkan hal tersebut kemudian kebijakan-kebijakan baru bisa diterapkan dan mempermudah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakan pendidikannya. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakannya tersebut menempati posisi yang sangat urgen pada tataran keberhasilan penerapan kebijakannya tersebut. Selama ini, hal yang paling rapuh dan lemah dalam usaha memajukan pendidikan di Indonesia adalah tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Hal tersebut kemudian bisa melahirkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan para oknum di daerah-daerah yang merasa leluasa tanpa adanya pengawasan dari pusat. (Riyadu, 2008:2)

Pada tahun 2009, Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) meluncurkan program sekolah gratis. Program sekolah gratis sendiri dikaitkan dengan adanya paket Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan pemerintah sejak 2006 dan diberikan kepada sekolah SD sd SMP Negeri, MI dan MTs serta sekolah swasta di seluruh Indonesia.

Kebijakan BOS dilaksanakan sebagai implementasi Undang-Undang (UU) No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Itu artinya anak-anak usia SD di semua wilayah Indonesia harus sekolah hingga jenjang SMP tanpa dibebani dengan beragam pungutan dari pihak sekolah.

Masalahnya adalah benarkah sekolah gratis itu tidak menarik biaya dari siswanya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Mengapa hingga kini masih mendengar adanya keluhan dari orang tua murid terkait adanya beragam pungutan liar alias pungli di lingkungan sekolah. Sisi gratis yang didengungkan Depdiknas perlu diperjelas konsepnya agar tidak terjadinya

kesimpangsiuran makna sekolah gratis. Jika tak ada konfirmasi yang jelas tentang apa yang digratiskan itu, maka dikhawatirkan masyarakat terutama di desa-desa yang awalnya tertarik menyekolahkan anaknya justru berbalik menuding adanya kebohongan dan tidak menyekolahkan anak-anaknya. Bagi mereka pemahaman sekolah gratis adalah semua biaya anak-anak sekolah ditanggung pemerintah.

Pemerintah perlu segera mensosialisasikan tentang ide sekolah gratis ini secara terbuka untuk menyikapi kebingungan publik. Termasuk menjelaskan tentang kriteria pengelolaan dana BOS sebagai salah satu penopang dana wajib belajar di sekolah. Pemerintah perlu pula menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan sendiri terdiri dari biaya investasi, biaya operasional untuk personalia maupun nonpersonalia, bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Sementara biaya pribadi peserta didik adalah dana yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bias mengikuti proses pendidikan. Disini jelas terlihat bahwa tidak semua dana pendidikan ditanggung pemerintah seperti biaya peserta didik yang menjadi tanggung jawab masyarakat khususnya orangtua siswa.

Program BOS dan sekolah gratis yang digagas pemerintah memang akan sulit memenuhi harapan masyarakat, khususnya warga miskin yang masih memiliki beban ekonomi keluarga meski dana BOS telah naik hingga 50 persen pada tahun ini. Oleh karena sebagaimana amanat UU 20/2003, beban pembiayaan pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda). Jika pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN sebanyak 20 persen untuk sektor pendidikan, maka pemda seharusnya

berkontribusi yang sama yakni menyisihkan 20 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang pendidikan.

Adanya kebijakan BOS tahun 2009 tidak hanya memberikan peran kepada Depdiknas tetapi juga memberikan 3 peran penting kepada pemda. Pertama, pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional BOS melalui APBD jika dana BOS dari Depdiknas tidak mencukupi. Kedua, pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar. Dan ketiga, pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan terhadap siswa yang mampu.

Berdasarkan kebijakan di atas, peran pemda cukup strategis terutama untuk menjamin kesediaan dana BOS bila tidak mencukupi melalui mekanisme anggaran APBD-nya. Meski diakui tidak semua pemda baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota bersedia menyisihkan 20 persen anggaran APBD untuk sektor pendidikan setidaknya ada *political will* dari pemda untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan BOS di lapangan. Pengawasan ini amat penting mengingat peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN bisa saja terjadi baik yang dilakukan pihak sekolah, dinas pendidikan atau pihak lainnya. Penyimpangan pelaksanaan BOS yang ditemukan di lapangan biasanya terkait dengan kegiatan fiktif dan terjadinya *mark up* yang dilakukan oknum tertentu.

Semua pihak tidak menginginkan jika dana BOS yang awalnya diperuntukkan untuk menyukseskan program wajib belajar justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum maupun pihak yang ingin mencari keuntungan semata. Oleh karena

itu, peran pengawasan yang melekat pada masyarakat harus dimanfaatkan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas para pengelola dana BOS ini. Peran orangtua melalui komite sekolah juga amat penting agar kontrol dan penyaluran dana BOS dapat tepat sasaran terutama menjelang tahun ajaran baru ini. Jika ini terjadi, maka harapan anak-anak Indonesia untuk menikmati sekolah gratis yang dikampanyekan pemerintah melalui paket dana BOS bukanlah sebuah mimpi belaka.

Pelaksanaan BOS di Kabupaten Melawi diarahkan untuk SD, SLB, dan SMP. Pelaksanaan BOS untuk SD direncanakan untuk 190 SD dengan 186 SD negeri dan 4 SD swasta dengan perkiraan jumlah murid 27.357 orang siswa. Total anggaran pertriwulan mencapai Rp. 2.715.182.250. Kabupaten Melawi terbentuk tahun 2003 berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2003. Kabupaten Melawi merupakan kabupaten yang relatif baru di Kalimantan Barat sehingga kebijakan daerah masih memerlukan pengawasan intensif termasuk di bidang pendidikan. Adanya program BOS yang merupakan program pemberian bantuan yang langsung ke setiap sekolah, menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Melawi yang memiliki daerah dengan kondisi geografis yang jauh dari kota dan relatif sulit aksesibilitas.

Mengingat sangat pentingnya BOS bagi dunia pendidikan, peneliti semakin terdorong untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan kebijakan BOS tersebut. Penelitian terhadap pelaksanaan BOS juga untuk melihat peran serta pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Proses Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian pengukuran implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Belimbing menarik untuk dilakukan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Tinjauan dibatasi pada tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil yang dicapai.
2. Tinjauan terhadap masalah ini terbatas pada 5 sekolah di kecamatan Belimbing kabupaten Melawi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis/akademis
 - a. Sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan kebijakan dan implementasi BOS.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah ilmu administrasi publik khususnya di bidang implementasi kebijakan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki kebijakan BOS agar lebih terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Bagi sekolah penelitian ini merupakan gambaran pelaksanaan BOS sehingga dapat dijadikan referensi dalam mempersiapkan diri dalam pengelolaan dana BOS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Implementasi Kebijakan

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariasi bentuknya. Dunn (1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Dye (1989:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya James Anderson dalam Dye (1989:2) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Di samping itu kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat (Dunn, 1994:63-64).

Beberapa konsep kebijakan publik tersebut, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab (1997:4) yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik

berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Salusu (1996:63) mendefinisikan implementasi sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Higgins dalam Wahab (1997:6) menyatakan bahwa implementasi adalah kegiatan itu menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang pada akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.

Proses implementasi kebijakan negara merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Implementasi program pemerintah melibatkan berbagai tingkatan struktur organisasi dan sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Wahab, 1997:63) yaitu:

- a. Pemerakarsa kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga antar pejabat di tingkat yang lebih rendah. Penekanan utama terletak pada masalah sejauh mana sasaran-sasaran atau tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah penyebab tujuan/sasaran tercapai atau tidak tercapai.
- b. Pejabat pelaksana di lapangan, fokusnya terletak pada upaya menanggulangi hambatan yang terjadi di wilayah kerjanya.
- c. Aktor perorangan di luar pemerintah kepada siapa proyek itu ditujukan, misalnya kelompok sasaran pengusaha kecil dan Koperasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pandangan/persepsi pejabat di pusat adalah sejauhmana pelayanan jasa yang direncanakan telah dilaksanakan. Dari sisi kelompok sasaran fokus perhatiannya adalah apakah pelayanan jasa yang telah diberikan pemerintah dapat mengubah pola hidupnya.

Berbagai model atau teori telah dikembangkan oleh para pakar untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan negara baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan, akan semakin mendalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan model atau teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1986:25) yang disebut *A frame work for implementation analysis* merupakan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dalam model ini implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang mencakup :

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah meliputi beberapa aspek seperti:

1) Kesukaran teknis

Tujuan suatu program pemerintah akan tercapai bila telah terpenuhi sejumlah persyaratan teknis antara lain kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator prestasi kerja, prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Sebagai contoh kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak banyak hambatan-hambatan teknis sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan mudah.

Keberhasilan suatu program perlu pula ditunjang dengan teknologi tertentu. Permasalahan akan dapat dikendalikan apabila tersedia teori yang mampu menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku dengan pemecahan masalah, persyaratan teknologi dipenuhi dan tindakan untuk mengatasi masalah tidak mahal.

2) Keragaman perilaku yang akan diatur

Berbagai pelayanan masyarakat ditandai dengan beranekaragamnya perilaku anggota masyarakat sehingga semakin sulit membuat peraturan kebijakan yang jelas dan tegas. Konsekuensinya, semakin besar kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat di lapangan, dapat berakibat menimbulkan perbedaan mendasar dalam tingkat

keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian permasalahan masyarakat dapat dikendalikan apabila variasi/perbedaan perilaku yang menyebabkan timbulnya masalah relatif kecil.

3) Prosentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk

Pada umumnya semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang akan diubah akan semakin besar peluang memobilisasikan peluang dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang tercapainya tujuan kebijakan. Permasalahan akan mudah dikendalikan apabila kelompok sasaran merupakan bagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.

4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diharapkan

Modifikasi yang diinginkan adalah fungsi dari jumlah total kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka maka akan tercapai tujuan formal kebijakan. Masalah yang dapat dikendalikan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan termasuk dalam klasifikasi 'sedang'.

b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi

Cara pembuat kebijakan berperan cukup berarti untuk mencapai tujuan kebijakan dengan upaya memberdayakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Suatu kebijakan baik berupa Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya

dapat menstrukturkan proses implementasi dengan menjabarkan tujuan-tujuan formal yang kemudian diseleksi oleh lembaga/instansi yang tepat untuk mengimplementasikannya. Isi kebijakan harus memberi kewenangan dan dukungan dana pada lembaga/institusi yang dapat mempengaruhi orientasi kebijakan kepada pejabat/pelaksana dengan memberi kesempatan/memberdayakan pihak-pihak swasta dalam proses implementasi. Beberapa aspek yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1) Kecermatan dan kejelasan jenjang tujuan yang akan dicapai

Rumusan tujuan kebijakan disusun secara cermat, jelas dan sesuai dengan urutan kepentingannya akan berperan sebagai pedoman bagi pejabat pelaksana maupun sebagai alat bantu untuk mengevaluasi program dan juga sebagai dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Tujuan yang tersusun secara jelas merupakan sumber segala tindakan bagi para aktor/ pelaku yang terlibat baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga/instansi. Dalam praktek apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai output lembaga/instansi pelaksana dengan apa yang tertuang dalam tujuan kebijakan, maka pelaksana kebijakan harus mengembalikannya kepada rincian tujuan dikaitkan dengan keseluruhan konteks isi kebijakan. Peraturan yang akan diimplementasikan oleh lembaga/instansi pelaksana harus secara jelas dan konkrit mencantumkan ketentuan-ketentuan sebagai skala prioritas dalam program yang akan dilaksanakan oleh lembaga/ instansi yang bersangkutan.

2) Keterandalan teori kausalitas yang digunakan

Secara implisit dalam tujuan kebijakan memuat teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana tujuan kebijakan diupayakan akan dicapai. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah dan tercapainya tujuan program dapat dipahami secara jelas oleh para pejabat yang bertanggung jawab mengimplementasikan program dari sejumlah mata rantai pencapaian tujuan.

3) Ketepatan alokasi sumber dana

Tersedianya dana pada tingkat ambang batas tertentu sangat diperlukan, agar peluang untuk mencapai tujuan formal tercapai.

4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara instansi/ lembaga pelaksana

Koordinasi di lingkungan lembaga/instansi sulit diwujudkan, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan harus mampu mengatur keterpaduan hirarki instansi/lembaga pelaksana sehingga implementasi kebijakan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari lembaga/instansi pelaksana suatu peraturan yang jelas dan konsisten dapat menciptakan kepatuhan kelompok sasaran dan juga dapat mempengaruhi proses implementasi dengan cara menggariskan ketegasan peraturan bagi pembuat keputusan lembaga/instansi pelaksana.

6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang terdapat dalam peraturan

Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dalam upaya mengubah kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sangat diperlukan kesepakatan terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut.

7) Akses formal dari pihak luar

Para pelaku (aktor luar) dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tergantung pada sejauhmana peluang-peluang diberikan kepada mereka.

c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan sebagaimana termuat dalam keputusan kebijakan.

Output kebijakan dari lembaga/instansi pelaksana pada hakekatnya adalah fungsi dari interaksi antara struktur hukum dan proses politik. Dalam hal suatu keputusan kebijakan yang hanya sedikit memberikan pedoman hukum akan membuat tindakan pejabat pelaksana kebijakan selalu bergantung pada faktor luar (eksternal). Suatu keputusan kebijakan yang dirumuskan dengan cermat dengan mempergunakan sumber hukum yang memadai dapat membekali pejabat pelaksana bsesuasi dengan arah kebijakan yang telah ditentukan. Keputusan kebijakan semacam ini dapat mengantisipasi perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada wilayah

yang luas dan kondisi yang berbeda. Beberapa aspek yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Perbedaan wilayah, kondisi, waktu, sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi merupakan variabel eksternal kunci yang dapat mempengaruhi output kebijakan institusi/lembaga pelaksana.

2) Dukungan publik

Variabel eksternal lainnya adalah dukungan publik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada sistem politik yang demokratis publik dapat mempengaruhi implementasi dengan cara pendapat umum melalui media masa, publik opini dan isu-isu yang berkembang atau pengamatan pendapat umum (*public opinion polls*).

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Pengaruh langsung yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan melalui komentar-komentar atau pendapat atas keputusan kebijakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui pengumpulan pendapat, himbauan yang mereka sampaikan pada institusi/ lembaga pembuat kebijakan.

4) Dukungan dari instansi/lembaga atasan yang berwenang

Pimpinan instansi/lembaga atasan dari pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan implementasi kebijakan melalui

pengawasan/kontrol dan perubahan-perubahan formal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengawasan mengacu pada interaksi antara badan pelaksana dengan lembaga atasannya atau badan pengawasan eksternal.

5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Output kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel bahan-bahan pelaksana. Hal ini berarti bahwa kesepakatan para pejabat instansi pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Kesepakatan tersebut paling tidak ada 2 (dua) komponen, yaitu a) para pejabat pelaksana harus dapat menentukan skala prioritas tujuan kebijakan, b) kemampuan pejabat pelaksana untuk menjangkau pencapaian tujuan dalam kondisi normal dengan memanfaatkan

Pentahapan dalam proses implementasi dapat ditinjau sesuai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Output kebijakan dari bahan instansi/lembaga pelaksana.
- b. Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.
- c. Dampak nyata output kebijakan instansi/lembaga pelaksana.

Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, Dunn (1995:610) menyajikan suatu tabel kriteria evaluasi yang didalamnya memuat tipe kriteria, pertanyaan yang perlu diajukan serta ilustrasinya. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
EFEKTIVITAS	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
EFISIENSI	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
RESPONSIBILITAS	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survei
KETEPATAN	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merita dan efisien

Sumber : Dunn (1995)

Berbagai teori tersebut tersebut, yang merupakan kondisi yang diharapkan atau bersifat normatif, selanjutnya dipergunakan untuk melihat kondisi nyata di lapangan sebagaimana terlihat pada data implementasi kebijakan BOS.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Bertitik tolak dari kerangka teori beberapa ahli, maka peneliti mencoba menghubungkan antara obyek penelitian implementasi kebijakan dengan variabel yang dikemukakan beberapa ahli studi implementasi kebijakan. Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kinerja implementasi kebijakan, yaitu : kewenangan (*authority*), sumber daya (*resources*), sikap (*commitment*) (Wibawa, 1994:19).

Hubungan variabel kewenangan, sumber daya, sikap sebagai variabel independen terhadap kinerja implementasi kebijakan pengelolaan perikanan lebak lebung, akan dijelaskan melalui uraian berikut :

a. Kewenangan

Wewenang adalah dasar atau pondasi tempat manajemen melakukan kegiatan-kegiatannya guna mempengaruhi aktivitas para bawahan pada jenjang hirarki organisasi. Wewenang bersumber dari peraturan-peraturan, norma-norma/ketentuan-ketentuan yang memberikan kejelasan tentang ruang lingkup (*scope*) dan yang membatasi dalam pelaksanaannya.

Wewenang yang dijalankan manajemen pemerintah adalah alat kekuasaan politik yang telah ditetapkan kompetensi logis guna meningkatkan pelayanan publik. Wewenang sangat diperlukan guna merealisasikan tujuan-tujuan pemerintah yang dipercayakan kepada aparat administrasi, tanpa wewenang sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Di dalam wewenang terkandung kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap hasil karyanya. Kekuasaan dalam wewenang bukan berarti dapat bertindak semaunya melainkan pada hal-hal yang bersifat pengarah agar sesuai dengan koridor peraturan, akan tetapi didalamnya juga terkandung kuasa untuk bertindak bila menemukan penyelewengan (Grindle dalam Wibawa, 1994:22).

Dalam sistem pemerintahan, manajemen tingkat atas memberikan wewenang kepada manajemen bawah untuk melaksanakan suatu urusan tertentu. Pelimpahan wewenang ini dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis, eksplisit atau implisit. Untuk birokrasi pemerintahan wewenang diberikan secara

tertulis agar manajemen bawah memiliki landasan hukum untuk bertindak. Birokrasi yang efektif memberikan delegasi wewenang (*distribution of power*) kepada aparat pelaksana sesuai dengan tingkatan birokrasi untuk menjalankan kebijakan. Sebagai seorang manajer pemerintah kabupaten Bupati memiliki wewenang untuk menjalankan urusan yang dilimpahkan kepadanya dari pemerintah propinsi. Begitu juga dengan Bupati yang memiliki tugas yang banyak maka perlu melimpahkan sebagian wewenangnya kepada aparat dibawahnya

b. Sumber Daya

Isi dan pesan kebijakan dapat diterima secara cermat dan jelas oleh pelaksana lapangan namun sulit untuk diimplementasikan bila kurangnya ketersediaan sumber daya yang diperlukan, sehingga tidak efektif. Sumber daya dapat menjadi faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan publik (Edward dalam Winarno, 1989:95). Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia..

Selain itu implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang lain, baik yang berupa dana maupun insentif. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai (Wibawa, 1994:20). Adalah kenyataan bahwa motivasi dasar dari kebanyakan pegawai yang melakukan pekerjaan diluar tugas pokoknya adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan (insentif). Guna mendorong produktivitas kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan,

banyak organisasi memberikan insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi pegawai pemerintah.

c. Sikap

Faktor sikap atau komitmen juga turut menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan (Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa, 1994:26). Perubahan sikap pelaksana dan kelompok dalam masyarakat di berbagai wilayah terhadap tujuan kebijakan dan tindakan aparat pelaksana memainkan peran yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh pejabat publik yang berusaha untuk mengubah perilaku dari satu atau lebih kelompok masyarakat adalah bahwa derajat dukungan publik atas kebijakan berbeda-beda dari waktu ke waktu.

Perubahan sikap pelaksana dan kelompok masyarakat terjadi apabila kebijakan yang dijalankan selama ini telah membebani dan membatasi akses penghidupan mereka, dan secara alami akan terjadi penolakan. Tugas yang amat penting dari para birokrat daerah adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas menjadi suatu kekuatan masyarakat yang turut menentukan dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya bagi penentang kebijakan walaupun mereka tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan maupun aparat pelaksana, pada umumnya memiliki sumber-sumber dan insentif untuk ikut campur tangan dalam proses implementasi.

Rogers dan Bullock dalam Wibawa (1994:35) mengungkapkan bahwa keputusan seseorang untuk patuh terhadap suatu kebijakan merupakan fungsi dari

: (1) pelanggaran mudah dideteksi dan dibawa ke pengadilan, (2) adanya sanksi bagi yang melanggar, (3) sikap kelompok masyarakat terhadap keabsahan peraturan, (4) ongkos/beban bagi kelompok masyarakat yang patuh.

3. Ukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Cheema dan Rondinelli (1983:31), mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup pencapaian tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses fasilitas pemerintah

Selanjutnya Jackson dan Morgan dalam Wibawa (1994:42) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Selain itu Bernadin dan Russel sebagaimana dikutip Jones (1991:135) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja atau performansi suatu program pembangunan selalu dikaitkan dengan aktivitas pencapaian tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan aktivitas yang selalu ingin diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Dengan terwujudnya tujuan yang ditetapkan itu, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari implementasi kebijakan tertentu.

Kemudian apabila kinerja dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka dapat digambarkan bahwa sebuah proyek sebagai kegiatan dari program, agar dapat menjadi sasaran yang efektif untuk mencapai tujuan, menurut Robert Chambers, harus disusun dengan prosedur yang sederhana dan luas, serta dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana (Bryant dan White, 1987:108).

Kinerja menurut Rue dan Byars dalam Keban (1999) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil "*the degree of accomplishment*" atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu kebijakan. Wibawa (1994:19) mengemukakan bahwa kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar atau sasaran kebijakan. Tingkat tercapainya standar dan tujuan kebijakan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh aktor yang terlibat.

Kesederhanaan prosedur dapat melancarkan jalannya pelaksanaan kebijakan, juga memungkinkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kinerja kebijakan tertentu.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut Dunn (1994:62) sebagai berikut :

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

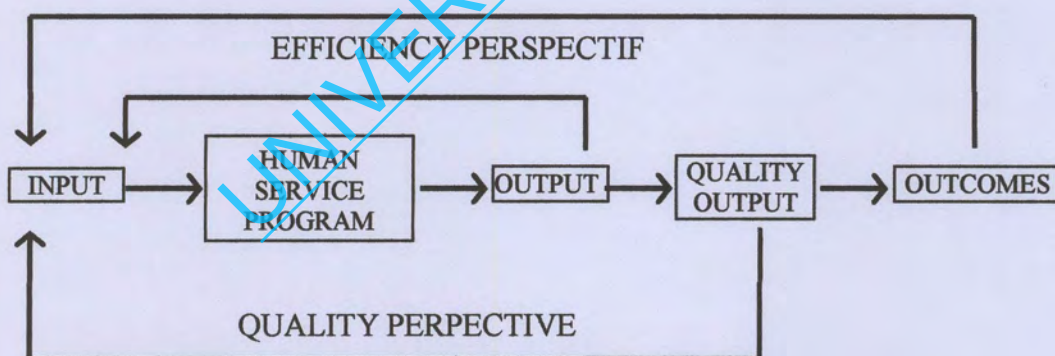
Kebhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001:21) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire dalam Wahab (2001:25) dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams dalam Wahab (2001:32) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Meter dan Horn (1975:12) adalah bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996:22) bahwa ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu : (1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) Perspektif kualitas (*quality perspective*), (3) Perspektif efektifitas (*effectiveness perspective*).

Dari ketiga perspektif tersebut menunjukkan perbedaan konsep program pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, serta penekanan pada perbedaan feedbacknya. Selanjutnya rangkaian perspektif menurut Martin dan Kettner seperti skema berikut:



Bagan 2.1 *Measuring Performance of Human Service Effectiveness Perspektif*

Sumber: Martin dan Kettner (1996)

Dari gambar tersebut Martin dan Kettner (1996:23) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Output* (hasil kerja kebijakan) untuk mengukur efisiensi kebijakan, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
- b. *Quality output* (mengukur kualitas kebijakan) apakah kualitas yang dilakukan dalam program ini memuaskan kelompok sasaran.
- c. *Outcomes* (dampak kebijakan) yaitu dampak jangka panjang pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan efektifitas merupakan *policy action* yang diambil atau ditempuh, mampu mencapai *policy goal* yang diinginkan karena setiap kebijakan mempunyai tujuan.

Sebagai indikator dari ketiga pelaksanaan kebijakan tersebut (*output, quality output dan outcomes*) memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Lebih lanjut Martin dan Kettner (1996:25) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri atas *policy goal, policy outcomes dan policy performance (policy output + policy goals)*. Apabila *policy outcomes* jauh dibawah *policy goal*, maka *policy performancenya* rendah. Akan tetapi bila *policy outcomes* jauh lebih tinggi dari *policy goals*, maka *policy performance* (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif *policy outcomes* itu sendiri terdiri atas : (1) *economic benefit*, (2) *subject well being*, (3) *equity*, dan (4) *integration social*. Keempat perspektif indikator pengukuran tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti keempat perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian (Martin dan Kettner, 1996).

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Latar Belakang

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini

akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

b. Definisi, Tujuan dan Sasaran

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi (Suyanto, 2009:3)

Lebih lanjut Suyanto (2009:4) mengatakan bahwa tujuan umum BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus BOS memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
- 2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Menurut Suyanto (2009:19), dana BOS dapat dipergunakan untuk beberapa keperluan seperti :

1) Pembelian buku teks pelajaran (BOS Buku)

Sebagian dana BOS harus untuk membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumlah siswa. Harga buku harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Depdiknas.

a) SD: buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d 6)

b) SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9)

Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru.

2) Operasional Sekolah (BOS tunai)

a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut

b) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan sekolah

c) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian,, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya

d) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum,, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa

e) Pembelian bahan-bahan habis pakai

f) Pembiayaan langganan daya dan jasa

g) Pembiayaan perawatan sekolah

h) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

i) Pengembangan profesi guru

j) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi

k) Pembiayaan pengelolaan BOS

l) Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar mengajar

m) Setelah komponen 1-10 terpenuhi dana tersisa dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan lain-lainnya

Menurut Suryanto (2009:8-9), ada beberapa kriteria yang dalam penentuan sekolah yang dapat menerima BOS yaitu :

- 1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
- 3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- 4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
- 6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

c. Kebijakan Program BOS Tahun 2009

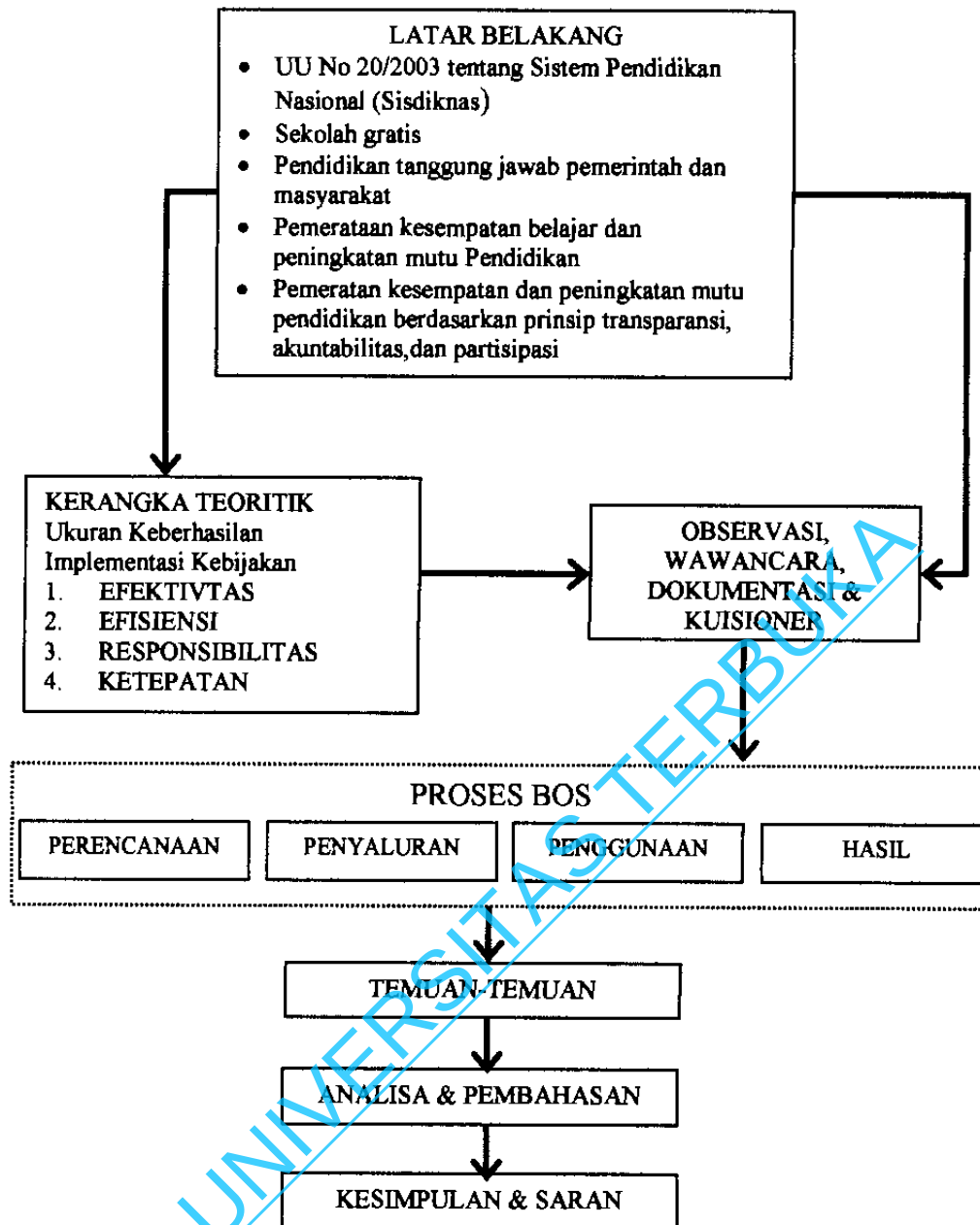
Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.

- 2) Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
- 3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
- 4) Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.
- 5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuat kerangka berpikir yang digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan BOS di kecamatan Belimbing kabupaten Melawi sebagai berikut ini:



Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : Peneliti (2009)

C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

- a. Implementasi Kebijakan adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu.
- b. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi ini menunjuk pada suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menemukan variabel yang sama. Dengan informasi tersebut, dapat diketahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan. Dapat juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi, 1989:33 & 46).

Pada penelitian ini ada empat variabel yang akan dianalisis dan dibahas.

Variabel tersebut antara lain :

1) Perencanaan BOS

Perencanaan ini melihat dari proses sosialisasi BOS sampai proses penganggaran dan pengalokasian dana BOS mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat pusat.

2) Penyaluran BOS

Variabel ini meliputi proses penyimpanan, pengambilan dan penyaluran dana BOS yang melalui mekanisme yang telah ditentukan.

3) Penggunaan BOS

Variabel ini meliputi mekanisme penggunaan, monitoring dan pelaporan, pemeriksaan dan sanksi terhadap penggunaan dana BOS.

4) Hasil Pelaksanaan BOS

Variabel ini melihat hasil dari pelaksanaan BOS di lapangan dengan melihat kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan di lapangan dan juga melihat respon dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan BOS ini (guru, murid, orang tua, komite sekolah dan juga masyarakat umum)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sutopo (2002), penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisa kualitatifnya. Terhadap data kuantitas, penelitian kualitatif tetap memandang sebagai kuantitas dan harus diolah dalam pola pikir kuantitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksa untuk dianalisa secara kuantitatif. Data kuantitas dihitung tidak dengan arahan pembuktian bagi suatu prediksi tetapi digunakan sebagai fenomena pendukung analisa kualitatif bagi kemantapan makna sebagai simpulan akhir. Penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kualitasnya tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara memandang atau prespektifnya.

Sementara itu juga, Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan; 1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Belimbing dengan subjek penelitiannya meliputi :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
2. Kepala Bagian dan Seksi
3. Tim Pelaksana BOS
4. Kepala Sekolah
5. Guru SD
6. Siswa SD
7. Orang tua siswa
8. Masyarakat umum

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara; dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kegiatan wawancara ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan berkunjung ke dinas pendidikan dan sekolah-sekolah sampel penelitian.
2. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil

temuan. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BOS seperti akademis, nonakademis dan ekstrakurikuler.

3. Dokumentasi; dilakukan untuk memperoleh data. Data ini diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi berupa data tentang anggaran BOS untuk sekolah di kecamatan Belimbing.

Untuk memberikan keabsahan data penelitian ini, dilakukan triangulasi data. Menurut Denzin dalam Moleong (2004), triangulasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber ini akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informasi atau data yang berbeda. Untuk itu penelitian dapat dilakukan dengan jalan :

1. Mengajukan pertanyaan lebih dari satu informan
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini dipergunakan dua jenis data yaitu

1. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan kuisioner.
2. Data skunder yang bersumber dari hasil dokumentasi. Data ini terdiri dari:

a. Bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi

- 1) Data Statistik Penerima Bantuan, yang berisikan tentang penerima bantuan tiap sekolah berdasarkan jenjang, status dan jenis sekolah.
- 2) Data Hasil Penyerapan Dana Bantuan
- 3) Data Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 4) Data Penanganan Pengaduan Masyarakat

b. Bersumber dari Sekolah Penerima BOS

- 1) Data nama-nama siswa miskin
- 2) Data jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana
- 3) Data lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
- 4) Data lembar pencatatan pengaduan

E. Analisis Data dan Bentuk Sajian Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Analisa terhadap data-data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan grafik.

F. Operasionalisasi Penelitian

Tabel 3.1.
Operasioanalisis Parameter

VARIABEL	PARAMETER	ALAT PENGUMPULAN DATA	RESPONDEN	SKALA ANALISIS
PERENCANAAN	• Sosialisasi • Pendataan sekolah • Kelengkapan administrasi sekolah • RKS / RAPBS tahun lalu dan tahun yang akan datang • Proposal	• Wawancara • Kuisioner • Observasi	• Kepala dinas • Kabag&Kasi • Tim Pelaksana BOS • Kepala sekolah • Guru	• Deskriptif
PEVALUASI	• Penyimpanan dana • Pengambilan dan Penyaluran dana	• Wawancara • Kuisioner • Observasi	• Kepala dinas • Kabag&Kasi • Tim Pelaksana BOS • Kepala sekolah • Guru	• Deskriptif
PENGUNTAAN	• Mekanisme Penggunaan Dana BOS • Monitoring dan pelaporan • Pmeriksaan dan sanksi	• Wawancara • Kuisioner • Observasi	• Kepala dinas • Kabag&Kasi • Tim Pelaksana BOS • Kepala sekolah • Guru • Siswa	• Deskriptif

13/40927	• Peserta didik/siswa • Tenaga Pendidik • Kondisi sekolah	• Wawancara • Kuisioner • Observasi	• Kepala dinas • Kabag&Kasi • Tim Pelaksana BOS • Kepala sekolah • Guru • Siswa • Masyarakat	• Deskriptif
-----------------	---	---	--	--

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati membuat Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi yaitu : “Terwujudnya Pendidikan Yang Bermutu Dan Terjangkau, Melalui Optimalisasi Layanan“. Visi tersebut dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Kabupaten Melawi, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi antara lain Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas serta peningkatan generasi muda, olahraga, seni dan budaya.

Adapun Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi adalah :

- a. Menciptakan pelayanan pendidikan yang merata, berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi, biaya dan kesempatan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berorientasi pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- c. Meningkatkan manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, dan Sekolah;

- d. Memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal;
- e. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas bidang seni budaya, pemuda dan olah raga.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut tujuan yang hendak dicapai Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi yaitu :

- a. Memperluas jangkauan, pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan
- b. Meningkatkan kualitas peserta didik.
- c. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara pendidikan.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan kepemudaan, keolahragaan dan kesenian.
- e. Meningkatkan SDM dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- f. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat

Strategi dan Kebijakan adalah arah yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi dan Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk memberi kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menuntaskan Wajib Dikdas 9 Tahun dan menyongsong Wajib 12 Tahun, dengan tetap memfokuskan pengarusutamaan gender dalam pola implementasinya;
- b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah;
- c. Penguatan Manajemen Institusi Pendidikan menuju era profesionalisme, transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif;
- d. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Pembinaan Olah raga, seni, budaya, dan kesiswaan/kepemudaan;

2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi mempunyai kedudukan sebagai unsur Dinas Teknis Daerah di Bidang pendidikan yang dipimpin

oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

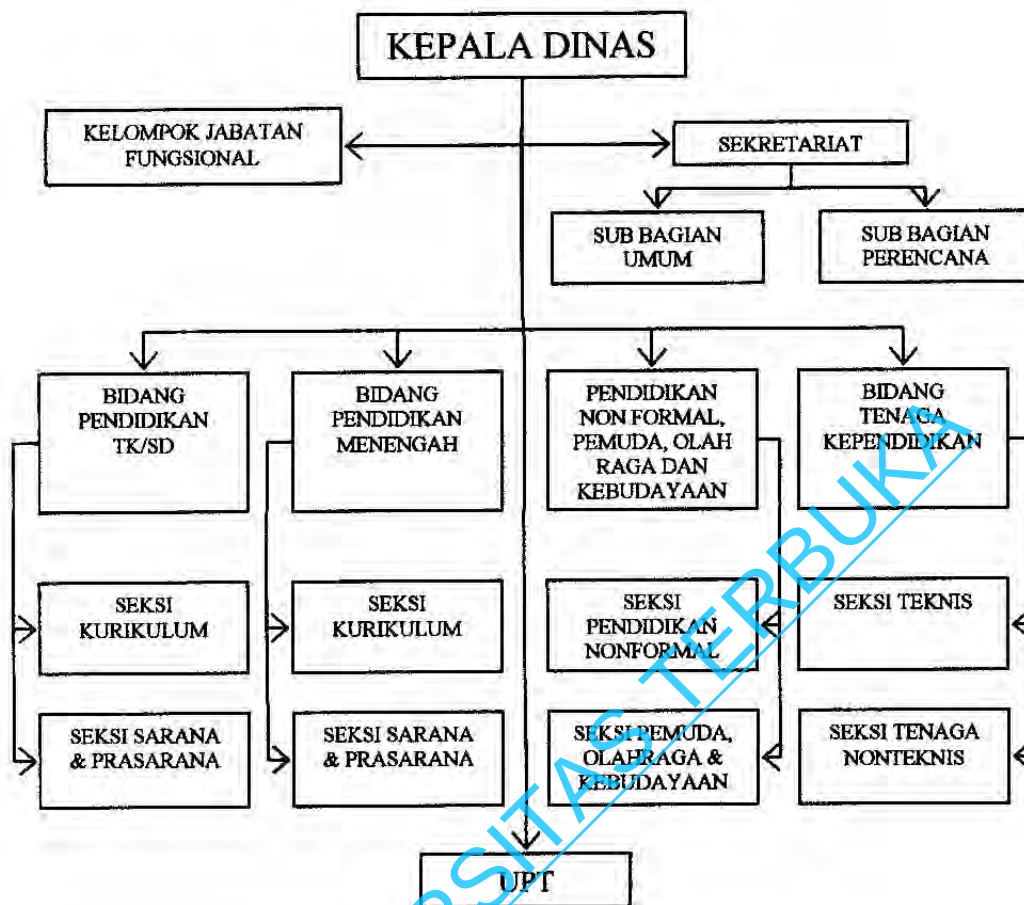
Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
- c. Bidang Pendidikan TK/SD, terdiri dari
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana;
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan;
- f. Bidang Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tenaga Teknis;
 - 2) Seksi Tenaga Non Teknis;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan 4.1 Susunan organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi 2009

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Melawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi, sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi
Melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- 4) Pelaksanaan pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- 6) Pelaksanaan pengurusan administrasi dinas pendidikan dan kebudayaan.

B. Gambaran Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Melawi

Pelaksanaan BOS merupakan suatu kegiatan estafet mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke masing-masing sekolah. Untuk masing-masing tingkatan memiliki tim manajemen yang mengelola pelaksanaan BOS. Pelaksanaan BOS di Kecamatan Melawi juga mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat. Adapun susunan tim manajemen BOS di Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
2. Tim Pelaksana BOS
 - Manajer
 - Unit Pendataan SD/SDLB
 - Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT
 - Unit Monev dan Penyelesaian Masalah
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Melawi
 - Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.
 - Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah.
 - Melakukan pendataan sekolah.
 - Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
 - Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.
 - Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
 - Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BOS dari sumber APBD.
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di Kabupaten Melawi
 - Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.

Pelaksanaan BOS di Kabupaten Melawi dilaksanakan setiap triwulan selama satu tahun anggaran. Artinya selama satu tahun, penyaluran anggaran BOS akan dilakukan sebanyak empat kali. Pelaksanaan BOS di Kabupaten Melawi diarahkan untuk SD, SLB dan SMP. Pelaksanaan BOS untuk SD direncanakan untuk 190 SD dengan 186 SD negeri dan 4 SD swasta dengan perkiraan jumlah murid 27.357 orang siswa. Total anggaran pertriwulan mencapai Rp 2.715.182.250. Untuk wilayah penelitian yaitu kecamatan Belimbing, bantuan BOS direncanakan untuk 18 SD dengan total anggaran mencapai Rp 297.849.250.

Objek penelitian dipilih 5 sekolah di kecamatan Belimbing dengan data-data sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data 5 Sekolah Penerima BOS Th. 2009

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH DANA
1.	SDN 2 BATU BUYIL	338	Rp 134.186.000
2.	SDN 6 PEMUAR	137	Rp 54.389.000
3.	SDN 21 SP 3 NOBAL	108	Rp 42.876.000
4.	SDN 24 LAMAN BUKIT	131	Rp 52.007.000
5.	SDN 25 BELONSAT	127	Rp 50.419.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, 2009

C. Analisa Implementasi Kebijakan Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing

Analisa implementasi kebijakan pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing akan melihat mulai dari tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil yang dicapai. Di setiap tahapan akan dianalisa parameter-parameter yang mendukung pelaksanaan setiap tahapan. Berikut ini analisa sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing.

1. Tahapan Perencanaan BOS

Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing. Pada tahapan ini akan dianalisis beberapa parameter yaitu :

- a. Proses Sosialisasi
- b. Proses Pendataan
- c. Proses melengkapi administrasi sekolah
- d. Proses Penyusunan RKS / RAPBS tahun lalu dan tahun yang akan datang
- e. Pembuatan Proposal

Berikut ini akan dijabarkan dan dianalisa detail pelaksanaan setiap tahapan dalam pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing.

a. Proses Sosialisasi

Tahapan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing adalah proses sosialisasi. Pada tahapan ini proses informasi tentang pelaksanaan BOS disampaikan lewat berbagai media baik media cetak, elektronik dan juga melalui surat edaran dan pemberitahuan.

Pelaksanaan proses sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kepala Dinas beserta pegawainya, Tim Pelaksana BOS, Kepala Sekolah dan guru. Berikut ini hasil wawancara terkait pelaksanaan proses sosialisasi yang dilakukan di kecamatan Belimbing.

“Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan BOS serta tujuan dan sasaran yang akan di capai” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Program BOS yang dicanangkan pemerintah dapat dengan mudah terdengar di masyarakat umum karena peran media masa dan elektronik. Namun detail dan teknisnya belum semua masyarakat mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu

dilakukan proses sosialisasi untuk menyampaikan detail dan teknisnya di lapangan” (wawancara dengan Manajer tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

Proses sosialisasi ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui teknis pelaksanaan BOS secara detail di lapangan. Sehingga diharapkan masyarakat mengerti apa tujuan dan sasaran pelaksanaan BOS. Bagi sekolah calon penerima BOS sosialisasi yang dilakukan pemerintah akan membantu mereka untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program BOS tersebut. Berikut hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut :

“Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat membantu kami mempersiapkan persyaratan dan kebutuhan untuk mengikuti program BOS tersebut. Karena persyaratan untuk mengikuti pelaksanaan BOS tersebut memerlukan persiapan yang matang dan akan memakan waktu” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

“Detail dan teknis pelaksanaan BOS dapat kami pahami setelah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami dapat mempersiapkan persyaratan untuk mengikutinya” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempublikasikan pelaksanaan BOS dapat membantu untuk masyarakat untuk memahami detail dan teknis dari pelaksanaan program BOS sehingga masyarakat dan pihak calon

penerima BOS dapat mempersiapkan kebutuhan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program tersebut.

b. Proses Pendataan

Setelah proses sosialisasi tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah proses pendataan. Pendataan ini dapat berupa pendataan sekolah dan pendataan siswa yang akan mengikuti program BOS ini. Pendataan ini melibatkan pihak sekolah serta unsur-unsur di dalamnya sebagai penerima BOS. Pendataan ini sangat penting untuk mengetahui jumlah sekolah dan siswa yang berhak mendapatkan BOS ini. Data ini diperlukan untuk pengajuan ke tingkat pusat untuk perencanaan anggaran yang akan dialokasikan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan proses pendataan :

“Tahapan yang dilakukan setelah proses sosialisasi adalah pendataan sekolah dan siswa yang berhak mendapatkan bantuan BOS. Data ini diperlukan untuk pengajuan ke tingkat pusat untuk dianggarkan” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“setelah proses sosialisasi dilakukan kami langsung melakukan pendataan terhadap sekolah yang layak menerima bantuan BOS tersebut untuk kemudian di laporkan untuk ditindaklanjuti” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pendataan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang sekolah dan siswa yang berhak menerima bantuan BOS tersebut. Pendataan dilakukan tidak hanya oleh Dinas Pendidikan tetapi Pihak sekolah juga melakukan pendataan. Jika pihak

Dinas Pendidikan mendata jumlah sekolah yang berhak menerima bantuan, maka pihak sekolah melakukan pendataan terhadap siswa yang berhak menerima bantuan BOS tersebut. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan tersebut:

“Setelah sekolah kami dinyatakan sebagai salah satu sekolah calon penerima bantuan BOS, maka kami lalu melakukan pendataan terhadap siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan BOS tersebut” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Pendataan terhadap siswa yang layak mendapatkan bantuan BOS kami lakukan setelah ada instruksi yang menyatakan bahwa sekolah kami berhak mendapat BOS. Pendataan tersebut diperlukan untuk kebutuhan rencana penganggaran alokasi dana” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pendataan baik itu pendataan terhadap sekolah maupun terhadap siswa yang berhak mendapatkan bantuan BOS dilakukan setelah proses sosialisasi. Pendataan ini dilakukan untuk kepentingan masalah penganggaran yang harus segera dilakukan.

c. Proses Melengkapi Administrasi Sekolah

Bersamaan dengan proses pendataan yang dilakukan pihak sekolah calon penerima bantuan BOS dapat juga dilakukan kegiatan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan BOS tersebut salah satunya adalah melengkapi administrasi sekolah. Hal ini perlu dilakukan selain untuk

melengkapi persyaratan penerimaan bantuan BOS juga sebagai cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data administrasi sekolah yang dilakukan oleh tim pelaksana BOS.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan kegiatan melengkapi administrasi sekolah ;

“Pihak sekolah calon penerima bantuan BOS hendaknya melengkapi semua persyaratan termasuk kelengkapan administrasi sekolah. Hal ini dapat membantu tim jika ada pertanyaan berkaitan dengan data-data administrasi sekolah dan siswa” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Kelengkapan administrasi sekolah salah satu persyaratan untuk menerima bantuan BOS. Kelengkapan administrasi ini dipergunakan untuk melengkapi data-data yang belum dilengkapi” (wawancara dengan Kasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kelengkapan administrasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah calon penerima BOS. Kelengkapan ini akan memuat semua data-data siswa yang akan menerima bantuan BOS.

Kelengkapan administrasi ini sangat berguna untuk mengetahui data-data siswa yang memperoleh bantuan dan dapat berfungsi sebagai alat monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selama menerima bantuan BOS. Berikut ini hasil wawancara

“Kelengkapan administrasi dapat menampung data-data siswa yang akan mendapatkan BOS. Kelengkapan administrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap persyaratan tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap

pelaksanaan BOS” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

“Setelah proses sosialisasi dan melengkapi data-data maka tahapan selanjutnya adalah proses melengkapi administrasi biak yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kelengkapan administrasi ini disusun untuk melengkapi persyaratan penerimaan bantuan BOS. Selain itu kelengkapan administrasi ini dapat dipergunakan juga sebagai sumber informasi data sekolah penerima BOS.

d. Proses Penyusunan RKS / RAPBS

Selain pendataan dan melengkapi administrasi sekolah, perlu juga mempertimbangkan penyusunan RKS/RAPBS. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memasukan kegiatan pelaksanaan bantuan BOS kedalam rencana kegiatan sekolah dan memasukan anggaran bantuan BOS kedalam anggaran belanja sekolah. Dengan memasukan program BOS kedalam RKS/RAPBS maka kegiatan BOS sudah menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan karena sudah masuk kedalam RKS/RAPBS tahun berjalan.

Berikut ini hasil wawancara terkait proses penyusunan RKS/RAPBS untuk melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan BOS :

“Untuk menjadikan progam BOS sebagai program yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah maka dapat dimasukan kedalam RKS/RAPBS tahun berjalan”

(wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Program BOS merupakan program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah yang menerima bantuan BOS. Sama seperti program kegiatan sekolah lainnya maka program BOS harus juga masuk ke dalam RKS dan RAPBS sekolah penerima BOS tersebut” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan BOS merupakan program kegiatan sekolah yang harus segera dilaksanakan juga. Sehingga program BOS juga harus masuk kedalam agenda sekolah yang tertuang di RKS dan APBS sekolah.

Proses penyusunan RKS/RAPBS menjadi sangat penting untuk sekolah yang akan menerima program bantuan BOS. Karena program BOS akan menjadi bagian dari RKS/RAPBS yang direncanakan. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan ini :

“Perencanaan RKS dan RAPBS perlu memasukan program BOS sebagai salah satu program kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan dimasukan Program BOS ini akan menunjukan keseriusan sekolah untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan BOS yang diterima. Dan ini menjadi bukti tertulis kepada Dinas Pendidikan selain bukti-bukti yang telah ada bersamaan dengan turunnya bantuan BOS” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Dengan memasukan program BOS kedalam RKS dan RAPBS menjadi bukti keseriusan pihak sekolah menjalankan program BOS untuk kemajuan dunia pendidikan kita sekarang ini” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan RKS dan RAPBS sekolah hendaknya memasukan program BOS sebagai salah satu program kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan memasukan program BOS kedalam rencana kerja sekolah akan menunjukan keseriusan pihak sekolah dalam mendukung kebijakan BOS.

e. Pembuatan Proposal

Setelah proses sosialisasi dilaksanakan dan sekolah calon penerima BOS masuk dalam rencana tersebut, maka langkah selanjutnya pihak sekolah dapat mengajukan proposal untuk dapat menerima program bantuan BOS. Proposal ini dibuat sebagai bukti keseriusan pihak sekolah untuk menerima dan menjalankan kebijakan BOS tersebut. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan proses pengajuan proposal yang dilakukan pihak sekolah untuk menerima bantuan BOS yang diajukan kepada tim pelaksana BOS kabupaten Melawi :

“Setelah sekolah yang bersangkutan dinyatakan layak sebagai calon penerima bantuan BOS, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat dan mengajukan proposal permohonan penerimaan bantuan BOS ke pada kami tim pelaksana BOS kabupaten Melawi untuk kami tindaklanjuti” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Jika pihak sekolah merasa sanggup dan bersedia melaksanakan program BOS maka pihak sekolah dapat mengajukan proposal permohonan ke tim yang telah ditunjuk dan dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kesediaan pihak sekolah untuk menerima bantuan BOS ditunjukkan dengan pembuatan dan pengajuan proposal permohonan kesediaan yang diajukan ke tim pelaksanaan BOS kabupaten Melawi yang telah dibentuk.

Proposal tersebut berisikan kesediaan dan kesanggupan pihak sekolah untuk menerima bantuan BOS tersebut. Proposal tersebut menggambarkan atau melampirkan kondisi sekolah yang patut untuk menerima bantuan seperti gambaran jumlah siswa miskin, kondisi bangunan kegiatan belajar mengajar yang kurang mendukung dan lain-lainnya. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut :

“Penyusunan proposal pengajuan permohonan bantuan BOS dibuat dengan melampirkan fakta-fakta yang mendukung untuk layak menerima bantuan BOS tersebut seperti gambaran kondisi siswa miskin, kondisi sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, dan gambaran-gambaran lainnya” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Pembuatan proposal merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk sekolah yang dinyatakan layak menerima bantuan BOS karena keadaan kondisi sekolah seperti kondisi siswa, guru dan sarana dan prasarana belajar mengajar” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sekolah yang layak menerima bantuan BOS diharapkan segera membuat proposal pengajuan untuk menerima bantuan BOS tersebut dengan melampirkan dan menggambarkan kondisi yang ada sekarang.

Berdasarkan hasil analisa terhadap tahapan-tahapan dari perencanaan BOS dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi terhadap kebijakan BOS sampai tahapan perencanaan ini berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari terpenuhinya beberapa kriteria yang sesuai dengan teori Dunn (1995) seperti :

- a. Efektivitas yang terlihat dari hasil yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. Efisiensi yang terlihat dengan banyaknya usaha yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk mendapatkan BOS mulai dari tahap sosialisasi sampai tahap pembuatan proposal.
- c. Responsibilitas terhadap hasil yang telah dilakukan seperti terlihat dari setiap usaha atau kegiatan dilakukan untuk selalu berusaha setiap sekolah mendapatkan BOS.
- d. Ketepatan dalam penentuan kebijakan yang diambil seperti penentuan sekolah yang layak mendapat BOS.

2. Tahapan Penyaluran BOS

Tahapan selanjutnya setelah tahapan perencanaan adalah tahapan penyaluran. Pada tahapan ini akan membahas bagaimana mekanisme penyaluran dana BOS tersebut.

Mekanisme penyaluran dana BOS di Kecamatan Belimbing akan dianalisis dari beberapa parameter yaitu :

- a. Penyimpanan dana
- b. Pengambilan dan penyaluran dana

Berikut ini akan dijabarkan dan dianalisa terhadap mekanisme penyaluran dana BOS di kecamatan Belimbing.

a. Penyimpanan Dana BOS

Dana BOS yang akan diterima masing-masing sekolah akan dimasukkan kedalam rekening milik sekolah. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi). Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan penyimpanan dana BOS.

“Dana BOS yang masuk ke sekolah disimpan di rekening bank masing-masing sekolah. Dan rekening tersebut bukan atas nama pribadi tetapi harus atas nama sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap penggunaan dana BOS yang menyalahgunakan dan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Untuk mempermudah penyaluran dana BOS maka dana BOS akan dimasukkan ke rekening sekolah. Dengan melalui rekening maka penyaluran dana BOS akan tepat sasaran karena jika dana tersebut diberikan secara tunai dikhawatirkan akan terjadinya pungutan yang tidak diinginkan. Penggunaan rekening ini juga dapat membantu untuk memonitor penggunaan dana BOS tersebut nantinya” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dana BOS yang diterima masing-masing sekolah langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah bukan rekening rekening pribadi dan perseorangan. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang

Dana BOS yang langsung masuknya ke rekening masing-masing sekolah akan membantu mempermudah mengontrol penggunaan dana BOS tersebut.. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut :

“Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekolah bukan rekening kepala sekolah atau salah seorang guru sehingga akan sangat membantu bagi kami untuk mengontrol pengambilan dan penggunaan dana BOS tersebut. Akibatnya pengambilan dan penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan dan dapat diketahui umum.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

“Pengelolaan dana BOS akan semakin terbuka dan transparan karena semua dana yang masuk ke pihak sekolah melalui satu rekening yaitu rekening atas nama sekolah bukan perorangan atau individu.” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS untuk masing-masing sekolah penerima langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah. Dengan masuknya dana BOS ke rekening sekolah dapat mempercepat dana tersebut sampai ke pihak sekolah dengan harapan dana tersebut dapat langsung dipergunakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dana yang masuk melalui rekening sekolah dan bukan rekening pribadi atau individu sangat membantu untuk mengontrol penggunaan dana tersebut dan diharapkan dapat bersifat transparan dan terbuka dalam pengelolaannya.

b. Pengambilan dan Penyaluran Dana BOS

Pengambilan dan penyaluran dana BOS di setiap sekolah penerima disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat. Setelah anggaran dari pemerintah pusat disalurkan ke rekening masing-masing sekolah, baru kemudian masing-masing sekolah dapat mengambil dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Tahun Anggaran 2009, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- 1) SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
- 2) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
- 3) SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
- 4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait jumlah dana BOS yang akan diterima setiap sekolah, maka untuk 5 sekolah objek penelitian di Kecamatan Belimbing memperoleh dana BOS

sebesar Rp 397.000,-/siswa/tahun. Berikut ini rincinan data sekolah penerima BOS yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4.2 Jumlah Dana BOS 5 Sekolah di Kecamatan Belimbing Th. 2009

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH DANA
1.	SDN 2 BATU BUYIL	338	Rp 134.186.000
2.	SDN 6 PEMUAR	137	Rp 54.389.000
3.	SDN 21 SP 3 NOBAL	108	Rp 42.876.000
4.	SDN 24 LAMAN BUKIT	131	Rp 52.007.000
5.	SDN 25 BELONSAT	127	Rp 50.419.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, 2009

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah dana BOS yang diterima masing-masing sekolah disesuaikan dengan jumlah murid dengan aturan setiap satu orang murid akan mendapat Rp 397.000 / tahun. Jumlah dana BOS tersebut akan diberikan ke setiap sekolah secara bertahap. Tahapan penyaluran dana BOS tersebut dilakukan sebanyak 4 periode. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan mekanisme proses pengambilan dan penyaluran dana BOS.

“Proses pengambilan dan penyaluran dana BOS untuk setiap sekolah baik itu di Kecamatan Belimbing maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Melawi telah diatur oleh pemerintah pusat melalui tim majemen BOS baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat sekolah..” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Prosedur dan mekanisme pengambilan dan penyaluran dana BOS tidak memerlukan prosedur yang rumit. Karena dana BOS yang dikirim ke masing-masing sekolah langsung masuk ke rekening sekolah dan tidak ada potongan sepeserpun. Dana yang masuk ke rekening sekolah disesuaikan dengan jumlah murid penerima yang diajukan sebelumnya oleh sekolah.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di peroleh informasi bahwa mekanisme pengambilan dan penyaluran dana BOS telah diatur sesuai dengan buku panduan. Dana BOS akan langsung masuk ke rekening sekolah tanpa ada perantara lagi. Berikut ini mekanisme proses pengambilan dana BOS sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- 1) Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
- 2) Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah.
- 3) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun yang dapat

menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

- 4) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- 5) Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.

Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah. Setelah dana BOS diambil dari rekening sekolah, dana tersebut langsung dapat disalurkan sesuai dengan RKAS atau RAPBS yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut :

“Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekolah yang kami miliki. Kemudian dana BOS tersebut segera kami pergunakan sesuai dengan rencana yang telah kami buat sebelumnya sesuai dengan RAPBS.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Dana BOS yang diterima oleh sekolah dipergunakan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Penggunaannya juga sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui dan diajukan oleh pihak sekolah ke tim BOS baik

kabupaten maupun propinsi. Dan pelaksanaanya juga diawasi bersama baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat.” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan dan penyaluran dana BOS melibatkan beberapa pihak terkait mulai dari tim manajemen BOS pusat sampai tim manajemen BOS sekolah. Proses penyaluran dana BOS langsung dilakukan dari lembaga penyalur dana ke pihak sekolah melalui rekening sekolah. Penyaluran dana BOS oleh pihak sekolah harus sesuai dengan RAPBS yang telah dibuat dan diajukan ke tim manajemen BOS.

Berdasarkan hasil analisa terhadap implemetasi kebijakan BOS terkait dengan penyaluran dana BOS diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan berjalan baik sesuai dengan teori Dunn (1995) seperti ketepatan penyaluran yang melalui rekening sekolah bukan rekening pribadi/perorangan sehingga akan mudah dikontrol.

3. Tahapan Penggunaan Dana BOS

Tahap selanjutnya setelah tahap penyaluran adalah tahap penggunaan. Pada tahapan ini akan membahas mengenai mekanisme penggunaan dana BOS serta proses pengawasannya.

Pada tahapan penggunaan dana BOS di Kecamatan Belimbing akan dianalisis dari beberapa parameter yaitu :

- a. Mekanisme Penggunaan Dana BOS
- b. Monitoring dan Pelaporan
- c. Pemeriksaan dan Sanksi

Berikut ini akan dijabarkan dan dianalisa terhadap tahapan pelaksanaa dana BOS di kecamatan Belimbing.

a. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan rencana anggaran dan belanja yang telah disepakati baik oleh tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Dan rencana anggaran tesebut juga telah mendapatkan persetujuan dari tim manajemen kabupaten maupun propinsi.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Dana BOS yang diberikan kesetiap sekolah penerima harus dipergunakan untuk kepentingan sekolah tersebut sehingga pihak sekolah diharuskan membuat rencana anggaran atau RAPBS yang melibatkan semua guru dan juga komite sekolah sehingga penggunan dana BOS akan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan” (wawancara dengan Kepala Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS diarahkan untuk kepentingan sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus membuat RAPBS yang telah disepakati bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah.

Berdasarkan seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
- 2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

- 6) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- 8) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- 9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- 10) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- 11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- 12) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan

BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

- 13) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- 14) Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

Penggunaan dana BOS dilarang untuk beberapa kegiatan. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain.

- 3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- 4) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- 5) Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- 6) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- 7) Membangun gedung/ruangan baru.
- 8) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- 9) Menanamkan saham.
- 10) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan sekolah terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan sasaran dari penggunaan dana BOS tersebut siswa, guru, sarana dan prasarana yang semuanya secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Dana BOS yang kami terima bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami baik itu kualitas siswa, guru maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Setahu kami penggunaan dana BOS diarahkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah penerima. Oleh karena itu, dalam usulan rencana dan kegiatan untuk memanfaatkan dana BOS perlu ditekankan untuk pelaksanaan kegiatan yang selalu berusaha untuk peningkatan kualitas pendidikan” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan termasuk kualitas peserta didik, tenaga pendidik/guru dan juga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut ini hasil rekapitulasi penggunaan dana BOS di 5 sekolah sebagai gambaran penggunaan dana BOS untuk peningkatan kualitas pendidikan.

**Tabel 4.3 Penggunaan Dana BOS 5 Sekolah
di Kecamatan Belimbing Th. 2009**

NO	KEGIATAN	SDN DI KEC. BELIMBING					JUMLAH
		SDN 3	SDN 6	SDN 21	SDN 24	SDN 25	
1.	PENERIMAAN SISWA BARU	•	•	•	•	•	5
2.	PEMBELIAN BUKU REFERENSI PERPUSTAKAAN	•	•	•	•	•	5
3.	PEMBELIAN BUKU TEKS PERPUSTAKAAN	•	•	•	•	•	5
4.	EKSTRAKURIKULER	•	•	•	•	•	5
5.	ULANGAN HARIAN, UMUM, UJIAN SEKOLAH	•	•	•	•	•	5
6.	PEMBELIAN ATK	•	•	•	•	•	5
7.	PEMBAYARAN LISTRIK & TELP	•	•	•	•	-	3
8.	PERAWATAN SEKOLAH	•	•	•	•	•	5
9.	HONOR GURU	•	•	•	•	•	2
10.	PENGEMBANGAN PROFESI GURU	•	•	•	•	•	5
11.	TRANSPORTASI SISWA MISKIN	-	-	-	-	•	1
12.	PEMBIAYAAN PENGELOLAAN BOS	•	•	-	-	-	2
13.	PEMBELIAN KOMPUTER	•	•	•	•	•	5

Sumber : Analisa peneliti, 2010

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan dana BOS lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan

termasuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar seperti pembelian buku, Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer dan juga untuk perawatan sekolah seperti pengecatan dan perbaikan (atap, pintu, jendela, kursi, meja dan lainnya). Peningkatan kualitas tenaga pendidikan juga menjadi perhatian dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Selain bidang akademik, penggunaan dana BOS juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, karya ilmiah, pramuka, palang merah, dan kegiatan sejenisnya.

b. Monitoring dan Pelaporan

Pelaksanaan BOS dapat berjalan lancar dan transparan jika dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Pada penelitian ini akan diuraikan secara ringkas tentang pelaksanaan monitoring dan supervisi (monitoring internal) yang dilakukan oleh pengelola program yaitu dari tim manajemen BOS Kabupaten Melawi.

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi yang dilakukan tim manajemen BOS Kabupaten Melawi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi dana sekolah penerima bantuan
- 2) Penyaluran dan penggunaan dana
- 3) Pelayanan dan penanganan pengaduan
- 4) Administrasi keuangan
- 5) Pelaporan

Dalam pelaksanaannya tim manajemen BOS Kabupaten Melawi melakukan dua kegiatan, yaitu monitoring pelaksanaan program dan monitoring penanganan pengaduan.

Monitoring pelaksanaan program ini bertujuan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah dan memantau penggunaan dana di tingkat sekolah. Monitoring ini dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Responden terdiri dari sekolah, murid dan/atau orangtua murid, dan kantor pos/bank. Dari hasil monitoring terhadap sekolah di

Kabupaten Melawi termasuk lima sekolah objek penelitian ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara dana yang dibutuhkan dengan program kegiatan, banyaknya kegiatan dalam satu program yang fiktif dan munculnya kegiatan baru yang tidak direncanakan dalam satu program kegiatan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan hasil monitoring terhadap pelaksanaan program BOS.

“Dari hasil monitoring terhadap program pelaksanaan BOS baik itu pada saat penyaluran maupun pasca penyaluran dana BOS, kami menemukan beberapa permasalahan di lapangan seperti ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan, banyaknya kegiatan fiktif kegiatan dan munculnya yang tidak direncanakan” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Kami banyak menerima laporan dari tim manajemen BOS mengenai banyaknya terjadi penyimpangan selama pelaksanaan program yang menggunakan bantuan BOS. Penyimpangan ini dapat teridentifikasi karena adanya pengawasan dari tim manajemen BOS.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Monitoring juga dilakukan oleh tim manajemen terhadap setiap pengaduan selama pelaksanaan BOS di setiap sekolahnya. Monitoring terhadap penanganan pengaduan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah serta mendokumentasikannya. Pelaksanaan monitoring ini juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan yang terjadi. Responden dari monitoring ini disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Pengaduan ini tidak hanya disampaikan oleh pihak yang melaksanakan program saja tetapi masyarakat

umum juga dapat menyampaikan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan BOS karena pelaksanaan BOS ini bersifat transparan dan terbuka yang memungkinkan semua orang termasuk masyarakat umum untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaannya. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan ini.

“Selama pelaksanaan BOS ini beberapa kali ditemukan adanya penyimpangan di lapangan. Penyimpangan ini kami ketahui dari hasil laporan pengaduan masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan BOS ini. Setiap laporan penyimpangan yang kami terima segera kami respon dan kami cari pokok permasalahannya untuk kemudian kami cari solusinya” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 7 Januari 2010)

“Pelaksanaan BOS tidak hanya menjadi tanggung jawab tim pelaksana BOS baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat luas. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS dan mempunyai hak untuk menyampaikan masukan dan melaporkan setiap terjadinya penyimpangan.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 9 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan BOS tidak hanya melibatkan tim pelaksana baik di tingkat sekolah maupun ditingkat yang lebih tinggi tetapi juga melibatkan semua pihak termasuk masyarakat umum. Masyarakat umum ini dapat berfungsi sebagai alat monitoring pelaksanaan BOS dan berhak untuk menyampaikan masukan dan melaporkan setiap pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan BOS. Dengan adanya pengawasan dari semua pihak diharapkan

pelaksanaan BOS dapat berjalan dengan baik. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Pelaksanaan BOS di sekolah kami dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan karena adanya peran serta berbagai pihak termasuk masyarakat umum yang selalu mengawasi dan memberikan masukan selama proses pelaksanaan BOS ini.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Keterlibatan masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan BOS karena masyarakat selalu mengawasi pelaksanaan BOS dan selalu memberikan masukan guna kelancaran pelaksanaan BOS ini” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Kami sangat senang dengan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengawasi pelaksanaan BOS di sekolah yang ada di Kecamatan Belimbing ini. Dengan keterlibatan kami dalam mengawasi pelaksanaan BOS ini kami berharap pelaksanaan BOS akan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan maupun penyimpangan yang terjadi.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing tidak hanya melibatkan tim manajemen pelaksana BOS untuk memonitoring pelaksanaan program dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta berbagai pihak untuk membantu kesuksesan pelaksanaan BOS ini seperti peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan BOS ini. Dari hasil kuisioner menyatakan bahwa 93% responden menyatakan peran serta masyarakat sangat membantu keberhasilan pelaksanaan BOS dengan selalu mengawasi,

melaporkan setiap penyimpangan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Selain masalah monitoring, permasalahan pelaporan juga sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan BOS. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Untuk setiap masing-masing sekolah hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan/atau didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

- 1) Nama-nama siswa miskin yang digratiskan
- 2) Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.
- 3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
- 4) Lembar pencatatan pengaduan

Dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah akan sangat membantu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan BOS di setiap sekolah. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan tersebut.

“Dengan adanya laporan yang dibuat oleh pihak sekolah akan dapat membantu kami mengetahui apakah pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mengetahui

permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program BOS” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Laporan yang dibuat sekolah tentang pelaksanaan BOS sangat membantu kami mengetahui gambaran pelaksanaan BOS di setiap sekolah yang menerima dana BOS” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Kami selalu melaporkan pelaksanaan BOS di sekolah kami baik itu laporan per triwulan maupun laporan akhir tahun. Laporan tersebut sebagai gambaran pelaksanaan BOS di sekolah kami. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat membantu pihak terkait mengenai gambaran pelaksanaan BOS di tempat kami.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan yang dibuat setiap sekolah yang menerima dana BOS dapat bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan BOS di sekolah tersebut.

c. Pelanggaran dan Sanksi

Sanksi dalam pelaksanaan BOS biasanya berupa sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
- 3) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
- 4) Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan Provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan BOS di lima sekolah objek penelitian, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab. Pelanggaran tersebut rata-rata masih merupakan pelanggaran dengan tingkat yang rendah sehingga sanksi yang diberikan tidak sampai melalui proses hukum dan masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Pelanggaran tersebut rata-rata adalah penyelewengan kewenangan, penyelewengan dana BOS dan *mark up* dana BOS untuk suatu kegiatan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan ini.

“Dalam pelaksanaannya, bantuan BOS sering terjadi pelanggaran oleh beberapa oknum. Oknum ini biasanya orang yang terlibat langsung terhadap penyaluran dana BOS. Pelanggaran yang dilakukan masih dalam katagori ringan sehingga tidak memerlukan proses hukum lebih lanjut hanya

diselesaikan secara musyawarah bersama.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Pelanggaran yang sering terjadi selalu merugikan pelaksanaan BOS oleh karena itu setiap pelanggaran baik itu pelanggaran wewenang maupun penyimpangan penggunaan dana harus diproses dan diselesaikan. Dan penyelesaiannya diupayakan secara kekeluargaan karena kalo sudah masuk ranah hukum akan berkepanjangan.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing masih dalam katagori ringan dan penyelesaiannya tidak sampai proses hukum lebih lanjut.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, maka perlu pengawasan yang melibatkan semua unsur terkait seperti tim manajemen BOS, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan juga masyarakat umum. Pengawasan ini dilakukan juga sebagai cara untuk menjaga kelancaran pelaksanaan BOS sehingga dana BOS akan sampai tepat sasaran. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan tersebut.

“Untuk menghindari pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan BOS kami selalu mengimbau untuk melakukan pengawasan bersama yang melibatkan semua pihak terkait sebagai alat kontrol pelaksanaan BOS.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Pelanggaran dalam pelaksanaan BOS dapat diantisipasi dengan pengawasan secara melekat yang melibatkan berbagai elemen termasuk masyarakat.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Kami merasa dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana dan akan tepat sasaran” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Kami merasa senang karena kami dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Sehingga kami dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan BOS dan kami dapat meyakinkan masyarakat lainnya bahwa pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta berbagai unsur terkait dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan BOS memberikan jaminan pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran.

Berdasarkan analisa terhadap penggunaan dana BOS terlihat jelas implementasi kebijakan BOS berjalan dengan baik. Indikatornya adalah penggunaan dana tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Hasil Pelaksanaan BOS

a. Peserta Didik/Siswa

Hasil dari pelaksanaan BOS diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah termasuk di dalamnya siswa dan guru. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan BOS ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka

wajib belajar 9 tahun. Jadi hasil dari pelaksanaan tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru saja tetapi masyarakat luas akan dapat meerasakannya.

Gambaran dari hasil pelaksanaan BOS terhadap peserta didik dapat dilihat dari tingkat siswa putus sekolah karena keterbatasan biaya. Berdasarkan data dari dinas pendidikan jumlah siswa putus sekolah mengalami penurunan sejak pelaksanaan BOS Juli 2005. Berikut data tersebut:

**Tabel 4.4 Data Jumlah Siswa Putus Sekolah
di Kecamatan Belimbing Th. 2009**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	TAHUN					
			2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	SDN 2 BATU BUYIL	338	2	3	0	0	0	0
2.	SDN 6 PEMUAR	137	1	2	0	0	0	0
3.	SDN 21 SP 3 NOBAL	108	1	1	0	0	0	0
4.	SDN 24 LAMAN BUKIT	131	2	0	1	1	0	0
5.	SDN 25 BELONSAT	127	3	4	1	0	0	0
	TOTAL	841	9	10	2	1	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, 2009

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa sejak ada pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing, jumlah siswa putus sekolah di 5 objek penelitian mengalami penurunan pada tahun 2003 berjumlah 9 orang sampai pada akhir 2008 jumlah siswa yang putus sekolah tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan BOS sangat membantu

masyarakat dalam membiayai pendidikan. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meringankan biaya sekolah anak mereka dan diharapkan dapat mewujudkan pendidikan belajar 9 tahun.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Dampak dari pelaksanaan BOS dapat dirasakan oleh masyarakat luas salah satunya menurunnya jumlah siswa putus sekolah pada sebelum tahun 2005 di kecamatan Belimbing minimal rata-rata siswa putus sekolah mencapai 1 orang persekolah tetapi sejak ada pelaksanaan BOS jumlah tersebut mengalami penurunan dari seluruh sekolah dasar di kecamatan hanya 2 sekolah yang masih terdapat siswa putus sekolah. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Program BOS sangat membantu kami dalam mengurangi angka siswa putus sekolah. Karena dana yang diberikan sangat membantu meringankan biaya khususnya untuk siswa yang kurang mampu” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Kami merasakan dampak dari pelaksanaan BOS itu, selain dapat melengkapi fasilitas seperti buku pelajaran, alat peraga dan lainnya juga bermanfaat untuk siswa yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat tersu melanjutkan pendidikannya” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Bantuan BOS sangat membantu saya untuk dapat melanjutkan pendidikan karena sekarang saya sekolah gratis dan juga saya mendapat bantuan buku-buku pelajaran” (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 13 Januari 2010)

“Pelaksanaan BOS sangat meringankan kami dalam membiayai anak kami sekolah. Karena anak kami dapat sekolah dengan gratis dan mendapat buku pelajaran.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Selain untuk membiayai siswa yang tidak mampu dan melengkapi buku pelajaran, dana BOS juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas siswa didik dalam berbagai bidang yang masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para siswa dapat lebih kreatif dan inovatif serta dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan bidang yang diminati. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing selain membantu siswa tidak mampu juga dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat siswa terhadap bidang tertentu.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat juga dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas siswa dibidang akademik dan nonakademik. Di bidang nonakademik dana BOS dapat dipergunakan untuk mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan bakat dari siswa sesuai dengan bidang yang diminati”. (wawancara dengan Kepala Bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Kami sangat terbantu dengan adanya program BOS ini, karena selain dapat memenuhi kebutuhan sekolah baik itu kebutuhan akademik maupun nonakademik atau ekstrakurikuler. Sehingga harapan kami siswa selain memiliki kemampuan akademik yang baik juga menguasai keterampilan sesuai dengan bidang yang diominasi melalui kegiatan ekstrakurikuler” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Dengan adanya dana BOS kami dapat mengembangkan kemampuan siswa diberbagai bidang sesuai dengan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebelumnya sulit kami laksanakan karean

kerterbatasan anggaran tetapi sekarang dapat kami laksanakan karena adanya bantuan BOS” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Sejak adanya program BOS, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami dapat dilaksanakan. Kami sangat senang karena kami dapat mengembangkan kemampuan kami sesuai bidang yang kami minati” (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 13 Januari 2010)

“Kami melihat sejak adanya bantuan BOS, kami melihat anak kami lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan keinginannya. Tetapi sebelum adanya dana BOS kami sering melihat anak kami melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat diluar jam sekolah karena di sekolah hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah itu mereka bebas bermain di rumah.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berikut ini gambaran kegiatan ekstrakurikuler 5 sekolah amatan di kecamatan Belimbing setelah adanya bantuan BOS.

**Tabel 4.5 Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Dasar di Kecamatan Belimbing
Th. 2009**

NO	KEGIATAN	SDN DI KEC. BELIMBING				
		SDN 3	SDN 6	SDN 21	SDN 24	SDN 25
1.	OLAHRAGA	•	•	•	•	•
2.	KESENIAN	•	•	•	•	•
3.	KARYA ILMIAH REMAJA	•	-	-	-	-
4.	PALANG MERAH REMAJA	•	•	-	-	-
5.	PRAMUKA	•	•	•	•	•

Sumber : Analisa peneliti, 2010

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS berpengaruh terhadap peserta didik/siswa. Siswa yang tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan. BOS juga membantu meningkatkan kualitas siswa baik dari segi akademik maupun nonakademik. Secara akademik siswa terbantu dengan adanya bantuan buku paket pelajaran dan bantuan lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Secara nonakademik, siswa akan dapat mengembangkan kemampuannya sesuai bidang yang diminati melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diminati.

b. Tenaga Pendidik

Program BOS yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun tidak hanya bermanfaat bagi siswa sekolah tetapi juga berdampak terhadap tenaga pendidik di sekolah penerima BOS.

Program BOS yang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan secara tidak langsung mengharuskan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Seorang Guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme ini akan membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diterima dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas siswa.

Kompetensi dan profesional seorang guru dapat dioperoleh dari kegiatan mengikuti pelatihan, kursus, kegiatan perkumpulan (KKG, MGMP). Dengan adanya bantuan BOS ini, pengembangan profesionalisme guru akan

dapat dibiayai. Hal ini dilakukan karena peningkatan kualitas guru merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan BOS tersebut yaitu untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Dana BOS juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan profesionalisme guru. Hal ini dapat dilakukan karena profesionalisme guru ini juga merupakan bagian dari tujuan program BOS untuk mewujudkan program pendidikan dasar 9 tahun.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Selain dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik dari siswa sekolah, program BOS ini juga membantu peningkatan dan pengembangan kualitas guru yang diharapkan dapat memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa”. (wawancara dengan Kepala Bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Dengan adanya bantuan BOS kami dapat mengalokasikan dana untuk mengembangkan profesionalisme guru yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa disekolah kami.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Kami merasa senang dengan adanya bantuan BOS ini. Karena kami dapat mengembangkan kemampuan profesionalisme kami melalui pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Hal ini dapat kami lakukan karena telah dianggarkan dengan menggunakan bantuan BOS” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Kami merasa setelah mengikuti pelatihan, para guru memiliki kemampuan mengejar lebih baik hal ini terlihat setelah guru tersebut mengikuti pelatihan dan pendidikan.” (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 14 Januari 2010)

“Kami melihat penggunaan dana BOS juga dimanfaatkan untuk peningkatan profesionalisme guru dengan membiayai

seluruh kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan profesionalisme tersebut. Hal ini sangat baik untuk mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program BOS tidak hanya berusaha meningkatkan kemampuan siswa sekolah penerima BOS tetapi juga untuk meningkatkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan para siswa.

c. Kondisi Sekolah

Pelaksanaan BOS juga berpengaruh terhadap kondisi fisik sekolah. Dengan adanya program BOS dana yang ada dapat dipergunakan untuk membiayai perawatan sekolah yang dapat mendukung kegiatan belajar siswa sekolah. Dana BOS tidak dapat dipergunakan untuk melakukan rehabilitasi sedang atau berat dan membangun gedung/ruangan baru tetapi dana tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan perawatan seperti melakukan pengecatan, perbaikan atap, perbaikan pintu jendela, perbaikan mebel, dan perbaikan sanitasi sekolah serta perawatan fasilitas sekolah lainnya. Berikut ini penggunaan dana BOS 5 sekolah objek pengamatan untuk kegiatan memelihara gedung sekolah.

Tabel 4.6 Kegiatan Perawatan Sekolah Dasar di Kec. Belimbing Th. 2009

NO	KEGIATAN PERAWATAN	SDN DI KEC. BELIMBING				
		SDN 3	SDN 6	SDN 21	SDN 24	SDN 25
1.	PENGECATAN	•	•	•	•	•
2.	PERBAIKAN PINTU JENDELA	•	•	-	•	-
3.	PERBAIKAN MEBELER	•	-	•	•	-
4.	SANITASI	•	•	-	-	-

Sumber : Analisa peneliti, 2010

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa setiap sekolah mengalokasikan dana yang diambil dari dana BOS untuk membiayai perawatan sekolah. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai perawatan sekolah sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dana tersebut hanya diperuntukan untuk biaya perawatan bukan untuk melakukan renovasi baik itu kecil maupun besar apalagi membangun bangunan atau menambah ruang” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya biaya perawatan sekolah yang biayanya diambil langsung dari anggaran BOS”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Setiap anggaran BOS turun kami selalu mengalokasikan dana untuk membiayai perawatan sekolah. Hal ini kami lakukan untuk menciptakan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Kami merasa program BOS sangat membantu kami tidak hanya meningkatkan kualitas siswa dan guru tetapi juga dapat dipergunakan untuk membiayai pengecatan ulang sekolah, perbaikan atap dan pintu jendela dan juga kursi dan meja belajar, serta fasilitas lainnya. Secara tidak langsung membantu memberikan kenyamanan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Kami sangat senang dengan adanya program BOS, karena ruang kelas kami lebih nyaman dari sebelumnya karena telah diperbaiki kerusakan yang ada dengan bantuan yang diperoleh dari dan BOS” (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 14 Januari 2010)

“Dana BOS sangat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap sekolah dan fasilitas pendukung yang ada. Sehingga kenyamanan siswa dalam belajar akan semakin membaik” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan observasi di lapangan, diperoleh informasi bahwa dana bos juga dapat dipergunakan untuk melakukan perbaikan terhadap sekolah tetapi tidak boleh untuk membangun bangunan baru dan melakukan rehap baik besar maupun kecil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan BOS (tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil) di Kecamatan Belimbing ini dapat disimpulkan berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan teori Dunn (1995:610) yang menyatakan evaluasi implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria seperti efektifitas, efisiensi, responsibilitas dan ketepatan.

1. Aspek Efektivitas

Berdasarkan teori Dunn (1995;610) pertanyaan yang mendasar terkait dengan kriteria efektifitas adalah apakah hasil implementasi kebijakan yang diinginkan telah tercapai. Kaitannya dengan pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing terlihat dari penyaluran dan penggunaan dana BOS di setiap sekolah diarahkan dapat tepat sasaran. Keinginan tersebut telah tercapai dengan dana BOS di kecamatan Belimbing yang diterima langsung oleh pihak sekolah tanpa perantara. Penggunaan dana juga sesuai dengan rencana yang diajukan hal ini terlihat dari hasil laporan dan monitoring dari tim manajemen BOS. Rencana yang dibuat merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BOS di Kecamatan Belimbing berjalan sesuai dengan rencana karena hasil dari pelaksanaan BOS telah tercapai.

2. Aspek Efisiensi

Berdasarkan teori Dunn (1995;610) efisiensi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan terkait dengan banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing aspek efisiensi terlihat dengan usaha sekolah-sekolah di Kecamatan Belimbing yang berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana BOS mulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan sampai pembuatan proposal. Usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan SDM (guru dan staf TU) yang dimiliki sekolah untuk membuat perencanaan

permohonan bantuan BOS. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BOS di Kecamatan Belimbing menerapkan aspek efisiensi dengan indikatornya adanya usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Aspek Responsibilitas

Berdasarkan teori Dunn (1995;610) responsibilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dapat terlaksana jika hasil dari kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Pada implementasi BOS di Kecamatan Belimbing, responsibilitas dapat terlaksana jika pelaksanaan BOS dapat memenuhi segala kebutuhan sekolah penerima BOS. Adanya bantuan BOS di Kecamatan Belimbing sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sekolah terkait dengan kegiatan belajar mengajar seperti pelaksanaan penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks, pembelian ATK, pelaksanaan ulangan, pembayaran listrik dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing sesuai dengan kriteria responsibilitas dengan hasil pelaksanaan BOS yang bermanfaat luas tidak hanya untuk pihak sekolah tetapi juga bermanfaat bagi siswa, masyarakat dan dunia pendidikan.

4. Aspek Ketepatan

Berdasarkan teori Dunn (1995;610) ketepatan dalam implementasi kebijakan dapat terwujud jika hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut benar-

benar berguna atau bernilai. Pada pelaksanaan implementasi BOS di Kecamatan Belimbing ketepatan terlihat dari pelaksanaan BOS yang secara langsung memberikan manfaat terhadap siswa, guru dan sekolah. Bagi siswa di Kecamatan Belimbing bantuan BOS bermanfaat untuk mengurangi angka putus sekolah terutama bagi siswa yang kurang mampu, membantu melengkapi buku pelajaran dan membiaya kegiatan ekstrakurikuler. Bagi guru, bantuan BOS bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru melalui pembiayaan kegiatan pelatihan, kursus, KKG dan MGMP. Sedangkan untuk sekolah, bantuan BOS bermanfaat untuk peningkatan sarana dan prasarana untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Peningkatan sarana dan prasarana ini seperti perbaikan sekolah, pengadaan meubeler, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing ini berjalan sesuai dengan aspek ketepatan.

D. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing

Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan BOS di Kecamatan Belimbing, dapat diketahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kebijakan BOS antara lain :

1. Faktor Kewenangan

Wewenang adalah dasar atau pondasi tempat manajemen melakukan kegiatan-kegiatannya guna mempengaruhi aktivitas para bawahan pada jenjang hirarki organisasi. Wewenang bersumber dari peraturan-peraturan,

norma-norma/ketentuan-ketentuan yang memberikan kejelasan tentang ruang lingkup (*scope*) dan yang membatasi dalam pelaksanaannya.

Kaitannya dengan Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing adalah kewenangan itu menggambarkan bagaimana kemampuan seorang pimpinan dalam hal ini Kepala Sekolah untuk manajemen dan mengatur bawahannya untuk mengelola, merencanakan dan menjalankan kebijakan BOS. Kepala sekolah pada posisi ini adalah penentu kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan BOS di Sekolah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan tersebut.

“Kepala sekolah sebagai orang yang diberikan wewenang penuh dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS harus dapat mengelola dana tersebut dengan baik sehingga alokasi dana akan tepat sasaran” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Kewenangan dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah kami serahkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk mengelola dan mengalokasikan dengan baik semua dana BOS dan tidak lupa juga melaporkan hasil dari pelaksanaan penyaluran dana BOS sebagai bukti tanggung jawab”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Dana BOS yang kami terima harus kami kelola sebaik mungkin karena dana tersebut merupakan amanat yang harus kami salurkan kepada pihak yang membutuhkan dan kami harus bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan tersebut” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Kami yakin dengan kepala sekolah kami dalam mengelola bantuan BOS tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Dana BOS yang diterima sekolah dapat disalurkan tepat pada sasaran karena telah dikelola dengan baik oleh guru-guru dengan dipimpin kepala sekolah” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi kewenangan dalam memimpin, mengelola dan mengatur kebijakan pelaksanaan BOS di sekolah masing-masing sangat besar. Kesuksesan pelaksanaan BOS ini juga tergantung dari kepemimpinan kepala sekolah.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber Daya ini adalah berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam menjalankan suatu kebijakan yaitu kebijakan BOS. Berdasarkan hasil dari analisa terhadap pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing terlihat jelas bahwa kemampuan individu untuk merencanakan dan mengelola dana BOS mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BOS. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Kemampuan SDM yang mengelola dana BOS ini mulai dari pusat sampai ke sekolah mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BOS” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Kualitas setiap personal atau inividu yang mengurus BOS haruslah kompeten sehingga penyaluran dana BOS akan terelisir sesuai dengan rencana”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Pengelolaan dan BOS terutama di sekolah kami dilakukan oleh para guru dan karyawan. Mereka kami pilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan kami merasa yakin pelaksanaan BOS akan berhasil baik” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Setiap guru yang dipilih untuk terlibat dipengelolaan dan penyaluran dana BOS adalah guru yang dapat dipercayai oleh kepala sekolah untuk mengelola dana BOS tersebut” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Kami melihat pengelolaan dana BOS sangat terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pihak sekolah sangat baik dan terencana” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi pelaksanaan dan penyaluran dana BOS dapat berjalan baik jika pengelolaan dan perencanaan dilakukan dengan baik dan matang serta melibatkan individu yang memiliki kemampuan di bidang tersebut.

3. Faktor Pengawasan

Program BOS merupakan program yang mudah terjadinya penyimpangan karena terkait dengan masalah uang. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelewengan perlu adanya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat umum. Dengan adanya pengawasan diharapkan pelaksanaan program BOS akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut ini hasil wawancara terkait permasalahan tersebut.

“Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOS kami berharap perlunya adanya pengawasan termasuk pengawasan independen dari masyarakat umum atau LSM” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

“Kami selalu menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan BOS bila perlu dibentuk suatu tim independen yang dapat mengawasi pelaksanaan BOS sehingga menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOS”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

“Kami selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sehingga pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana awal” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

“Pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sangat kami harapkan baik itu dari dinas maupun dari masyarakat sehingga dapat memberi masukan terhadap pelaksanaan BOS dan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

“Pelaksanaan BOS perlu adanya tim pengawas dari luar untuk menjamin terlaksananya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan BOS perlu adanya pengawasan untuk menjamin pelaksanaan BOS sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan tidak hanya dari dalam tetapi dapat dari luar atau independen untuk menjamin tidak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan analisis Tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi dalam Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Belimbing, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan kebijakan BOS di kecamatan Belimbing dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan perencanaan yaitu proses awal yang dilakukan oleh sekolah dalam mempersiapkan persyaratan dan dokumen administrasi untuk pengajuan dana BOS. Tahapan ini meliputi proses sosialisasi, pendataan, melengkapi administrasi sekolah, penyusunan RKS/RAPBS, dan pembuatan proposal.
 - 1) Proses sosialisasi yang dilakukan rangka mempublikasikan pelaksanaan BOS sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami detail dan teknis dari pelaksanaan program BOS.

- 2) Pendataan terhadap sekolah dan siswa yang berhak mendapatkan bantuan BOS untuk mempermudah proses penganggaran ditingkat pusat.
 - 3) Kelengkapan administrasi ini sangat berguna untuk mengetahui data-data siswa yang memperoleh bantuan dan dapat berfungsi sebagai alat mintoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selama menerima bantuan BOS
 - 4) Penyusunan RKS dan RAPBS sekolah memasukan program BOS sebagai salah satu program kegiatan yang harus dilaksanakan.
 - 5) Proposal permohonan bantuan BOS menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari sekolah calon penerima bantuan dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- b. Tahapan penyaluran BOS. Pada tahapan ini dana BOS yang diterima masing-masing sekolah di Kecamatan Belimbing dimasukan ke rekening milik sekolah bukan rekening pribadi. Proses pengambilan dilakukan secara bertahap setiap 3 bulanan kemudian disalurkan sesuai dengan anggaran yang dibuat.
- c. Tahapan penggunaan dana BOS. Pada tahapan ini sekolah-sekolah penerima di kecamatan Belimbing menggunakan dana tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaanya perlu dilakukan monitoring dan pengawasan secara efektif dan terpadu yang melibatkan

beberapa pihak seperti dari tim manajemen BOS Kabupaten Melawi, sekolah yang bersangkutan dan dari masyarakat umum.

d. Hasil pelaksanaan BOS. Dampak pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing ini berpengaruh terhadap:

- 1) Berkurangnya siswa putus sekolah. Di sekolah amatan tahun 2003 siswa putus sekolah berjumlah 18 orang dan pada akhir tahun 2008 tidak ada siswa yang putus sekolah.
- 2) Meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga (5 sekolah), kesenian (5 sekolah), Karya Ilmiah Remaja (1 sekolah), Palang Merah Remaja (2 sekolah) dan pramuka (5 sekolah)
- 3) Meningkatnya profesionalisme guru melalui kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKK.
- 4) Terawatnya fasilitas sekolah dengan adanya kegiatan pengecatan (5 sekolah), perbaikan pintu jendela (3 sekolah), perbaikan mebel (3 sekolah) dan perbaikan sanitasi (2 sekolah)

Hasil dari pelaksanaan BOS (tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan dan hasil) di Kecamatan Belimbing ini telah sesuai dengan prinsip implementasi kebijakan yang meliputi beberapa aspek.

1. Aspek Efektivitas yang terlihat dari penyaluran dan penggunaan dana BOS di setiap sekolah diarahkan dapat tepat sasaran.

2. Aspek Efisiensi yang terlihat dengan usaha sekolah-sekolah di Kecamatan Belimbing yang berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana BOS mulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan sampai pembuatan proposal.
 3. Aspek Responsibilitas yang terlihat dari pelaksanaan BOS untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah penerima BOS.
 4. Aspek Ketepatan yang terlihat dari hasil pelaksanaan BOS yang tepat sasaran, bermanfaat dan sesuai dengan keinginan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing adalah
- a. Faktor Kewenangan. Faktor ini menempatkan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi kewenangan dalam memimpin, mengelola dan mengatur kebijakan pelaksanaan BOS di sekolah masing-masing.
 - b. Faktor sumber daya. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam menjalankan suatu kebijakan BOS.
 - c. Faktor Pengawasan. Faktor pengawasan ini berperan dalam mengawasi pelaksanaan BOS dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada proses pelaksanaan BOS

- a. Pada tahap perencanaan hendaknya sekolah membuat kelengkapan administrasi, pendataan, RKS/RAPBS dan pembuatan proposal disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga anggaran yang diperoleh akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada tahapan penyaluran dana BOS hendaknya setiap sekolah melibatkan satu atau beberapa orang yang terlibat dalam penyaluran dana BOS dari pemerintah. Tugasnya untuk memonitoring dana yang masuk dan membuat laporan kepada pihak sekolah.
- b. Pada tahap penggunaan dana BOS diharapkan setiap sekolah tetap mengacu terhadap RKS/RAPBS yang telah dibuat sehingga dana BOS yang turun setiap triwulan akan cukup untuk membiayai kegiatan selama triwulan tersebut.
- c. Pada tahap pelaksanaan diharapkan dana BOS yang diterima memberikan manfaat terhadap siswa, guru dan juga sekolah. proporsi untuk ketiganya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

2. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan BOS ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Setiap Kepala Sekolah harus dapat memimpin, mengelola dan mengatur pelaksanaan BOS di sekolah masing-masing. Kepala sekolah dapat dibantu oleh beberapa orang guru dalam pengelolaan dana BOS tersebut.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan BOS hendaknya dilakukan secara rutin oleh tim manajemen BOS. Tim manajemen BOS juga harus dapat

mengakomodir laporan-laporan yang disampaikan orang tua siswa dan juga masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan BOS.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Anonim. (2005). *UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Bryant, C. & White, L.G. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Cheema, G.S., & Rondinelli D.A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Dye, R. T. (1989). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice hall, Inc, Englewood Cliffs.
- Effendi, S. (1989). *Seri Monografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No. 01 Tahun 1989*. Yogyakarta.
- Flavel, R. W. & Williams, J. (1996). *Strategic Management : A Practical Approach*. Sydney: Prentice Hall.
- Jones, C.O. (1991). *An Introduction to The Study of Public Policy*. California: Duxbury Press.
- Keban, Y. T. (1999). *Pengantar Administrasi Publik. Modul Matrikulasi, MAP-UGM*. Yogyakarta: UGM
- Martin, L.L. & Kettner, M.P. (1996). *Measuring The Performance of Human Service Programs*. London: International Educational and Professional Publisher.
- Meter, V., Donald S. & Horn, C.V.E. (1975). *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Framework in Administration and Society, Volume, 6 No. 4*. Beverly Hills: Sage.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, C.P. & Jackson, J.H. (1978). *Organization Theory*. New Jersey: Prentice-Hall

- Ripley, B.R. (1995) *Policy Analysis in Political Science*. Chicago : Nelson.
- Riyadu, Rizki. (2008). *Ada Apa Dengan Kebijakan Pendidikan Kita ?*. Jakarta: PP IPNU.
- Sabatier, P. & Mazmanian, D. (1986). *Top Down and Bottom Up Approach to Implementation Research*. Journal of Public Policy
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Suyanto. (2009). *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Solo: UNS Press.
- Wahab, A.S. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, S. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

b. Undang-undang

Anonim. (2005). *UU No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

c. Peraturan

Anonim, (2005). *PP RI No.19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*

PEDOMAN WAWANCARA
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

DAFTAR PERTANYAAN

A. Perencanaan BOS

1. Bagaimana Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing?
2. Bagaimana gambaran proses pendataan terhadap sekolah dan siswa calon penerima bantuan BOS?
3. Bagaimana gambaran proses kegiatan melengkapi administrasi sekolah untuk memenuhi persyaratan bantuan BOS?
4. Bagaimana pelaksanaan pembuatan RKS/RAPBS yang mengikutsertakan program BOS sebagai salah satu program kerja?
5. Bagaimana proses pembuatan proposal pengajuan permohonan pengajuan bantuan BOS?

B. Penyaluran BOS

1. Bagaimana proses penyimpanan dana BOS?
2. Bagaimana proses pengambilan dan penyaluran dana BOS terhadap setiap kebutuhan di masing-masing sekolah?

C. Penggunaan dana BOS

1. Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di kecamatan Belimbing?
2. Bagaimana proses monitoring dan pelaporan terhadap setiap penggunaan dana BOS?
3. Bagaimana proses pemeriksaan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dana BOS?

D. Hasil Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap peserta didik/siswa?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap tenaga pendidik?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap kondisi sekolah?

E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana faktor kewenangan dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?
2. Bagaimana faktor sumber daya dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?
3. Bagaimana faktor pengawasan dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

DAFTAR PERTANYAAN

A. Perencanaan BOS

1. Bagaimana Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing?
 - *"Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan BOS serta tujuan dan sasaran yang akan di capai" (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
 - *"Program BOS yang dicanangkan pemerintah dapat dengan mudah terdengar di masyarakat umum karena peran media masa dan elektronik. Namun detail dan teknisnya belum semua masyarakat mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses sosialisasi untuk menyampaikan detail dan teknisnya di lapangan" (wawancara dengan Manajer tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
 - *"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat membantu kami mempersiapkan persyaratan dan kebutuhan untuk mengikuti program BOS tersebut. Karena persyaratan untuk mengikuti pelaksanaan BOS tersebut memerlukan persiapan yang matang dan akan memakan waktu" (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)*
 - *"Detail dan teknis pelaksanaan BOS dapat kami pahami setelah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami dapat mempersiapkan persyaratan untuk mengikutinya" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)*

2. Bagaimana gambaran proses pendataan terhadap sekolah dan siswa calon penerima bantuan BOS?
 - *"Tahapan yang dilakukan setelah proses sosialisasi adalah pendataan sekolah dan siswa yang berhak mendapatkan bantuan BOS. Data ini diperlukan untuk*

pengajuan ke tingkat pusat untuk dianggarkan” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

- *“setelah proses sosialisasi dilakukan kami langsung melakukan pendataan terhadap sekolah yang layak menerima bantuan BOS tersebut untuk kemudian di laporkan untuk ditindaklanjuti” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Setelah sekolah kami dinyatakan sebagai salah satu sekolah calon penerima bantuan BOS, maka kami lalu melakukan pendataan terhadap siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan BOS tersebut” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *“Pendataan terhadap siswa yang layak mendapatkan bantuan BOS kami lakukan setelah ada instruksi yang menyatakan bahwa sekolah kami berhak mendapat BOS. Pendataan tersebut diperlukan untuk kebutuhan rencana penganggaran alokasi dana” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*

3. Bagaimana gambaran proses kegiatan melengkapi administrasi sekolah untuk memenuhi persyaratan bantuan BOS?

- *“Pihak sekolah calon penerima bantuan BOS hendaknya melengkapi semua persaratan termasuk kelengkapan administrasi sekolah. Hal ini dapat membantu tim jika ada pertanyaan berkaitan dengan data-data administrasi sekolah dan siswa” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Kelengkapan administrasi sekolah salah satu persyaratan untuk menerima bantuan BOS. Kelengkapan administrasi ini dipergunakan untuk melengkapi data-data yang belum dilengkapi” (wawancara dengan Kasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Kelengkapan administrasi dapat menampung data-data siswa yang akan mendapatkan BOS. Kelengkapan administrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap persyaratan tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan BOS” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)*
- *“Setelah proses sosialisasi dan melengkapi data-data maka tahapan selanjutnya adalah proses melengkapi administrasi biak yang dibutuhkan*

maupun yang tidak dibutuhkan” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

4. Bagaimana pelaksanaan pembuatan RKS/RAPBS yang mengikutsertakan program BOS sebagai salah satu program kerja?

- *“Untuk menjadikan program BOS sebagai program yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah maka dapat dimasukkan kedalam RKS/RAPBS tahun berjalan” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Program BOS merupakan program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah yang menerima bantuan BOS. Sama seperti program kegiatan sekolah lainnya maka program BOS harus juga masuk ke dalam RKS dan RAPBS sekolah penerima BOS tersebut” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Perencanaan RKS dan RAPBS perlu memasukan program BOS sebagai salah satu program kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan dimasukan Program BOS ini akan menunjukan keseriusan sekolah untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan BOS yang diterima. Dan ini menjadi bukti tertulis kepada Dinas Pendidikan selain bukti-bukti yang telah ada bersamaan dengan turunnya bantuan BOS” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *“Dengan memasukan program BOS kedalam RKS dan RAPBS menjadi bukti keseriusan pihak sekolah menjalankan program BOS untuk kemajuan dunia pendidikan kita sekarang ini” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*

5. Bagaimana proses pembuatan proposal pengajuan permohonan pengajuan bantuan BOS?

- *“Setelah sekolah yang bersangkutan dinyatakan layak sebagai calon penerima bantuan BOS, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat dan mengajukan proposal permohonan penerimaan bantuan BOS ke pada kami tim pelaksana BOS kabupaten Melawi untuk kami tindaklanjuti” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*

- *“Jika pihak sekolah merasa sanggup dan bersedia melaksanakan program BOS maka pihak sekolah dapat mengajukan proposal permohonan ke tim yang telah ditunjuk dan dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi” (wawancara dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Penyusunan proposal pengajuan permohonan bantuan BOS dibuat dengan melampirkan fakta-fakta yang mendukung untuk layak menerima bantuan BOS tersebut seperti gambaran kondisi siswa miskin, kondisi sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, dan gambaran-gambaran lainnya” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *“Pembuatan proposal merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk sekolah yang dinyatakan layak menerima bantuan BOS karena keadaan kondisi sekolah seperti kondisi siswa, guru dan sarana dan prasarana belajar mengajar” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*

B. Penyaluran BOS

1. Bagaimana proses penyimpanan dana BOS?

- *“Dana BOS yang masuk ke sekolah disimpan di rekening bank masing-masing sekolah. Dan rekening tersebut bukan atas nama pribadi tetapi harus atas nama sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap penggunaan dana BOS yang menyalahgunakan dan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Untuk mempermudah penyaluran dana BOS maka dana BOS akan dimasukkan ke rekening sekolah. Dengan melalui rekening maka penyaluran dana BOS akan tepat sasaran karena jika dana tersebut diberikan secara tunai dikhawatirkan akan terjadinya pungutan yang tidak diinginkan. Penggunaan rekening ini juga dapat membantu untuk memonitor penggunaan dana BOS tersebut nantinya” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekolah bukan rekening kepala sekolah atau salah seorang guru sehingga akan sangat membantu bagi kami untuk mengontrol pengambilan dan penggunaan dana BOS tersebut. Akibatnya pengambilan dan penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan dan dapat diketahui umum.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)*

- *"Pengelolaan dana BOS akan semakin terbuka dan transparan karena semua dana yang masuk ke pihak sekolah melalui satu rekening yaitu rekening atas nama sekolah bukan perorangan atau individu."* (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

2. Bagaimana prose pengambilan dan penyaluran dana BOS terhadap setiap kebutuhan di masing-masing sekolah?

- *"Proses pengambilan dan penyaluran dana BOS untuk setiap sekolah baik itu di Kecamatan Belimbing maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Melawi telah diatur oleh pemerintah pusat melalui tim majemen BOS baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat sekolah.."* (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)
- *"Prosedur dan mekanisme pengambilan dan penyaluran dana BOS tidak memerlukan prosedur yang rumit. Karena dana BOS yang dikirim ke masing-masing sekolah langsung masuk ke rekening sekolah dan tidak ada potongan sepeserpun. Dana yang masuk ke rekening sekolah disesuaikan dengan jumlah murid penerima yang diajukan sebelumnya oleh sekolah."* (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)
- *"Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekolah yang kami miliki. Kemudian dana BOS tersebut segera kami pergunakan sesuai dengan rencana yang telah kami buat sebelumnya sesuai dengan RAPBS."* (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)
- *"Dana BOS yang diterima oleh sekolah dipergunakan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Penggunaannya juga sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui dan diajukan oleh pihak sekolah ke tim BOS baik kabupaten maupun propinsi. Dan pelaksanaanya juga diawasi bersama baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat."* (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

C. Penggunaan dana BOS

1. Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di kecamatan Belimbing?

- *"Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan rencana anggaran dan belanja yang telah disepakati baik oleh tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Dan rencana anggaran tersebut juga*

telah mendapatkan persetujuan dari tim manajemen kabupaten maupun propinsi." (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

- "Dana BOS yang diberikan kesetiap sekolah penerima harus dipergunakan untuk kepentingan sekolah tersebut sehingga pihak sekolah diharuskan membuat rencana anggaran atau RAPBS yang melibatkan semua guru dan juga komite sekolah sehingga penggunaan dana BOS akan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan" (wawancara dengan Kepala Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)
- "Dana BOS yang kami terima bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami baik itu kualitas siswa, guru maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar." (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)
- "Setahu kami penggunaan dana BOS diarahkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah penerima. Oleh karena itu, dalam usulan rencana dan kegiatan untuk memanfaatkan dana BOS perlu ditekankan untuk pelaksanaan kegiatan yang selalu berusaha untuk peningkatan kualitas pendidikan" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

2. Bagaimana proses monitoring dan pelaporan terhadap setiap penggunaan dana BOS?

- "Dari hasil monitoring terhadap program pelaksanaan BOS baik itu pada saat penyaluran maupun pasca penyaluran dana BOS, kami menemukan beberapa permasalahan di lapangan seperti ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan, banyaknya kegiatan fiktif kegiatan dan munculnya yang tidak direncanakan" (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)
- "Kami banyak menerima laporan dari tim manajemen BOS mengenai banyaknya terjadi penyimpangan selama pelaksanaan program yang menggunakan bantuan BOS. Penyimpangan ini dapat teridentifikasi karena adanya pengawasan dari tim manajemen BOS." (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)
- "Selama pelaksanaan BOS ini beberapa kali ditemukan adanya penyimpangan di lapangan. Penyimpangan ini kami ketahui dari hasil laporan pengaduan masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan BOS ini. Setiap laporan penyimpangan yang kami terima segera kami respon dan kami

cari pokok permasalahannya untuk kemudian kami cari solusinya” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 7 Januari 2010)

- *“Pelaksanaan BOS tidak hanya menjadi tanggung jawab tim pelaksana BOS baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat luas. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS dan mempunyai hak untuk menyampaikan masukan dan melaporkan setiap terjadinya penyimpangan.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 9 Januari 2010)*
- *“Pelaksanaan BOS di sekolah kami dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan karena adanya peran serta berbagai pihak termasuk masyarakat umum yang selalu mengawasi dan memberikan masukan selama proses pelaksanaan BOS ini.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *“Keterlibatan masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan BOS karena masyarakat selalu mengawasi pelaksanaan BOS dan selalu memberikan masukan guna kelancaran pelaksanaan BOS ini” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *“Kami sangat senang dengan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengawasi pelaksanaan BOS di sekolah yang ada di Kecamatan Belimbing ini. Dengan keterlibatan kami dalam mengawasi pelaksanaan BOS ini kami berharap pelaksanaan BOS akan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan maupun penyimpangan yang terjadi.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*
- *“Dengan adanya laporan yang dibuat oleh pihak sekolah akan dapat membantu kami mengetahui apakah pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program BOS” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Laporan yang dibuat sekolah tentang pelaksanaan BOS sangat membantu kami mengetahui gambaran pelaksanaan BOS di setiap sekolah yang menerima dana BOS” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Kami selalu melaporkan pelaksanaan BOS di sekolah kami baik itu laporan per triwulan maupun laporan akhir tahun. Laporan tersebut sebagai gambaran pelaksanaan BOS di sekolah kami. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat membantu pihak terkait mengenai gambaran pelaksanaan BOS di tempat*

kami.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

3. Bagaimana proses pemeriksaan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dana BOS?

- *“Dalam pelaksanaannya, bantuan BOS sering terjadi pelanggaran oleh beberapa oknum. Oknum ini biasanya orang yang terlibat langsung terhadap penyaluran dana BOS. Pelanggaran yang dilakukan masih dalam katagori ringan sehingga tidak memerlukan proses hukum lebih lanjut hanya diselesaikan secara musyawarah bersama.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Pelanggaran yang sering terjadi selalu merugikan pelaksanaan BOS oleh karena itu setiap pelanggaran baik itu pelanggaran wewenang maupun penyimpangan penggunaan dana harus diproses dan diselesaikan. Dan penyelesaiannya diupayakan secara kekeluargaan karena kalo sudah masuk ranah hukum akan berkepanjangan.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *“Untuk menghindari pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan BOS kami selalu mengimbau untuk melakukan pengawasan bersama yang melibatkan semua pihak terkait sebagai alat kontrol pelaksanaan BOS.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *“Pelanggaran dalam pelaksanaan BOS dapat diantisipasi dengan pengawasan secara melekat yang melibatkan berbagai elemen termasuk masyarakat.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *“Kami merasa dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana dan akan tepat sasaran” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *“Kami merasa senang karena kami dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan BOS. Sehingga kami dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan BOS dan kami dapat meyakinkan masyarakat lainnya bahwa pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*

D. Hasil Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap peserta didik/siswa?

- *"Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meringankan biaya sekolah anak mereka dan diharapkan dapat mewujudkan pendidikan belajar 9 tahun." (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *"Dampak dari pelaksanaan BOS dapat dirasakan oleh masyarakat luas salah satunya menurunnya jumlah siswa putus sekolah pada sebelum tahun 2005 di kecamatan Belimbing minimal rata-rata siswa putus sekolah mencapai 1 orang persekolah tetapi sejak ada pelaksanaan BOS jumlah tersebut mengalami penurunan dari seluruh sekolah dasar di kecamatan hanya 2 sekolah yang masih terdapat siswa putus sekolah. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *"Program BOS sangat membantu kami dalam mengurangi angka siswa putus sekolah. Karena dana yang diberikan sangat membantu meringankan biaya khususnya untuk siswa yang kurang mampu" (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *"Kami merasakan dampak dari pelaksanaan BOS itu, selain dapat melengkapi fasilitas seperti buku pelajaran, alat peraga dan lainnya juga bermanfaat untuk siswa yang kurang mampu. Sehingga mereka dapat tersu melanjutkan pendidikannya" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *"Bantuan BOS sangat membantu saya untuk dapat melanjutkan pendidikan karena sekarang saya sekolah gratis dan juga saya mendapat bantuan buku-buku pelajaran" (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 13 Januari 2010)*
- *"Pelaksanaan BOS sangat meringankan kami dalam membiayai anak kami sekolah. Karena anak kami dapat sekolah dengan gratis dan mendapat buku pelajaran." (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*
- *"Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing selian membantu siswa tidak mampu juga dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat siswa terhadap bidang tertentu." (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*

- *"Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat juga dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas siswa dibidang akademik dan nonakademik. Di bidang nonakademik dana BOS dapat dipergunakan untuk mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan bakat dari siswa sesuai dengan bidang yang diminati". (wawancara dengan Kepala Bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *"Kami sangat terbantu dengan adanya program BOS ini, karena selain dapat memenuhi kebutuhan sekolah baik itu kebutuhan akademik maupun nonakademik atau ekstrakurikuler. Sehingga harapan kami siswa selain memiliki kemampuan akademik yang baik juga menguasai keterampilan sesuai dengan bidang yang diominasi melalui kegiatan ekstrakurikuler" (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *"Dengan adanya dana BOS kami dapat mengembangkan kemampuan siswa diberbagai bidang sesuai dengan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebelumnya sulit kami laksanakan karena keterbatasan anggaran tetapi sekarang dapat kami laksanakan karena adanya bantuan BOS" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *"Sejak adanya program BOS, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami dapat dilaksanakan. Kami sangat senang karena kami dapat mengembangkan kemampuan kami sesuai bidang yang kami minati" (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 13 Januari 2010)*
- *"Kami melihat sejak adanya bantuan BOS, kami melihat anak kami lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan keinginannya. Tetapi sebelum adanya dana BOS kami sering melihat anak kami melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat diluar jam sekolah karena di sekolah hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah itu mereka bebas bermain di rumah." (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*

2. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap tenaga pendidik?

- *"Dana BOS juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan profesionalisme guru. Hal ini dapat dilakukan karena profesionalisme guru ini juga merupakan bagian dari tujuan program BOS untuk mewujudkan program pendidikan dasar 9 tahun." (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*

- *"Selain dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik dari siswa sekolah, program BOS ini juga membantu peningkatan dan pengembangan kualitas guru yang diharapkan dapat memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa". (wawancara dengan Kepala Bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *"Dengan adanya bantuan BOS kami dapat mengalokasikan dana untuk mengembangkan profesionalisme guru yang dapat berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa disekolah kami." (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *"Kami merasa senang dengan adanya bantuan BOS ini. Karena kami dapat mengembangkan kemampuan profesionalisme kami melalui pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Hal ini dapat kami lakukan karena telah dianggarkan dengan menggunakan bantuan BOS" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *"Kami merasa setelah mengikuti pelatihan, para guru memiliki kemampuan mengejar lebih baik hal ini terlihat setelah guru tersebut mengikuti pelatihan dan pendidikan." (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 14 Januari 2010)*
- *"Kami melihat penggunaan dana BOS juga dimanfaatkan untuk peningkatan profesionalisme guru dengan membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan profesionalisme tersebut. Hal ini sangat baik untuk mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional." (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*

3. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap kondisi sekolah?

- *"Dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai perawatan sekolah sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dana tersebut hanya diperuntukan untuk biaya perawatan bukan untuk melakukan renovasi baik itu kecil maupun besar apalagi membangun bangunan atau menambah ruang" (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *"Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya biaya perawatan sekolah yang biayanya diambil langsung dari anggaran BOS". (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*

- *"Setiap anggaran BOS turun kami selalu mengalokasikan dana untuk membiayai perawatan sekolah. Hal ini kami lakukan untuk menciptakan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar." (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *"Kami merasa program BOS sangat membantu kami tidak hanya meningkatkan kualitas siswa dan guru tetapi juga dapat dipergunakan untuk membiayai pengecatan ulang sekolah, perbaikan atap dan pintu jendela dan juga kursi dan meja belajar, serta fasilitas lainnya. Secara tidak langsung membantu memberikan kenyamanan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *"Kami sangat senang dengan adanya program BOS, karena ruang kelas kami lebih nyaman dari sebelumnya karena telah diperbaiki kerusakan yang ada dengan bantuan yang diperoleh dari dan BOS" (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 14 Januari 2010)*
- *"Dana BOS sangat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap sekolah dan fasilitas pendukung yang ada. Sehingga kenyamanan siswa dalam belajar akan semakin membaik" (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*

E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan BOS

1. Bagaimana faktor kewenangan dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?

- *"Kepala sekolah sebagai orang yang diberikan wewenang penuh dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS harus dapat mengelola dana tersebut dengan baik sehingga alokasi dana akan tepat sasaran" (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *"Kewenangan dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah kami serahkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk mengelola dan mengalokasikan dengan baik semua dana BOS dan tidak lupa juga melaporkan hasil dari pelaksanaan penyaluran dana BOS sebagai bukti tanggung jawab". (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *"Dana BOS yang kami terima harus kami kelola sebaik mungkin karena dana tersebut merupakan amanat yang harus kami salurkan kepada pihak yang membutuhkan dan kami harus bertanggungjawab terhadap keberhasilan*

pelaksanaan tersebut” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

- “Kami yakin dengan kepala sekolah kami dalam mengelola bantuan BOS tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)
- “Dana BOS yang diterima sekolah dapat disalurkan tepat pada sasaran karena telah dikelola dengan baik oleh guru-guru dengan dipimpin kepala sekolah” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

2. Bagaimana faktor sumber daya dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?

- “Kemampuan SDM yang mengelola dana BOS ini mulai dari pusat sampai ke sekolah mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BOS” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)
- “Kualitas setiap personal atau inividu yang mengurus BOS haruslah kompeten sehingga penyaluran dana BOS akan terelisir sesuai dengan rencana”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)
- “Pengelolaan dan BOS terutama di sekolah kami dilakukan oleh para guru dan karyawan. Mereka kami pilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan kami merasa yakin pelaksanaan BOS akan berhasil baik” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)
- “Setiap guru yang dipilih untuk terlibat dipengelolaan dan penyaluran dana BOS adalah guru yang dapat dipercayai oleh kepala sekolah untuk mengelola dana BOS tersebut” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)
- “Kami melihat pengelolaan dana BOS sangat terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pihak sekolah sangat baik dan terencana” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

3. Bagaimana faktor pengawasan dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?

- *"Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOS kami berharap perlunya adanya pengawasan termasuk pengawasan independen dari masyarakat umum atau LSM" (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)*
- *"Kami selalu menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan BOS bila perlu dibentuk suatu tim independen yang dapat mengawasi pelaksanaan BOS sehingga menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOS". (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)*
- *"Kami selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sehingga pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana awal" (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)*
- *"Pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sangat kami harapkan baik itu dari dinas maupun dari masyarakat sehingga dapat memberi masukan terhadap pelaksanaan BOS dan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan" (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)*
- *"Pelaksanaan BOS perlu adanya tim pengawas dari luar untuk menjamin terlaksannya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan" (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)*